

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/274380167>

Dokumentasi Pemikiran tentang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 di Media Masa Nasional

Article · January 2013

CITATIONS

0

READS

767

1 author:



Suhana Nana

Bogor Agricultural University

18 PUBLICATIONS 4 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Ekonomi Kelautan [View project](#)

[TYPE THE COMPANY NAME]

Dokumentasi Pemikiran Suhana

Kliping Tulisan Dan Wawancara Suhana
Di Media Massa Tahun 2012

Disusun Oleh : Suhana

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

RI Mampu Produksi 20 Komoditas Perikanan Impor

JAKARTA — Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) meyakini Indonesia mampu memproduksi 20 jenis komoditas perikanan yang diimpor dari luar negeri.

“Tercatat Indonesia telah mengimpor 20.000 ton komoditas perikanan dan dari jumlah itu kami masih melihat adanya komoditas ikan yang bisa diproduksi di dalam negeri,” kata Sekretaris Jenderal KIARA Riza Damanik seperti di kutip Antara, Selasa (24/7).

Sejumlah komoditas perikanan impor yang diantaranya bisa digiatkan produksinya di Indonesia antara lain menurut Riza adalah udang, cumi-cumi, gurita, ikan kembung dan kerang.

Pemerintah memang mengetatkan impor perikanan hanya untuk komoditas yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri, namun di lapangan sejumlah importir masih membeli produk perikanan dari negara asing. “Ketidaksungguhan pelarangan impor mengindikasikan adanya ketidakharmonisan sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan maupun unit kerja di pelabuhan,” kata dia.

Sementara itu **Kepala Riset dan Kebijakan Ekonomi Kelautan di Pusat Riset Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana** mengatakan sebagian besar impor perikanan yang berasal dari China digunakan di Indonesia untuk bahan baku ikan asin.

Sayangnya, Indonesia juga mengekspor jenis ikan yang berkualitas ke luar negeri dan menerima komoditas yang hanya digunakan untuk bahan baku ikan asin. “Indonesia selama ini mencerdaskan sumber daya manusia negara lain sementara SDM Indonesia cukup dipasok dengan komoditas untuk ikan asin,” kata dia.

Pemerintah seharusnya bisa segera mengubah keadaan ekspor impor tersebut, dimana ikan segar dapat diolah di negara sendiri serta ikan olahannya bisa diekspor keluar seperti yang ditulis dalam Undang-Undang Perikanan.//arbi/antara

Editor — Fenty Wardhany

HARIAN TERBIT, Selasa, 24 Juli 2012 17:00 WIB

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Ekspor dan Impor Ikan Sama-Sama Bermasalah

NERACA, Thursday, 20 December 2012 | 12:29 WIB

Jakarta – Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana mengatakan, terdapat tiga isu utama dalam kaitannya dengan evaluasi kinerja sektor kelautan dan perikanan sepanjang 2012 silam. Yakni, kegagalan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan terus berulang, ekonomi perikanan dikuasai asing (investasi sektor perikanan, impor ikan, abk asing, ekspor ikan), dan pembangunan di pulau-pulau kecil masih berparadigma daratan (pembangunan jalan).

Dalam catatan Suhana, perkembangan impor ikan dan produk perikanan Indonesia pada 2012 (Per September) mengandung dua masalah. Pertama, pendekatan volume menjadi ciri khas ikan dan produk ikan yang di impor Indonesia, bukan pendekatan kualitas ikan dan produk perikanan. Hal ini, kata dia, secara sistematis telah berperan dalam menyediakan ikan dan produk perikanan kualitas rendah bagi penduduk dalam negeri, yakni untuk bahan baku industri ikan asin dan olahan lainnya. Permasalahan kedua, volume impor ikan meningkat terjadi pada saat nelayan nasional “panen ikan” (cuaca baik) sehingga ikan hasil tangkapan nelayan tidak terserap karena kalah bersaing dengan ikan impor yang harga murah.

Sementara itu, terkait dengan perkembangan ekspor ikan dan produk perikanan Indonesia pada 2012 (Per September), Suhana menjelaskan, terdapat beberapa permasalahan krusial. Yakni, pertama, pendekatan kualitas menjadi utama dalam ekspor ikan dan produk perikanan Indonesia ke negara tujuan yang secara sistematis telah berperan dalam meningkatkan pasokan kebutuhan gizi SDM negara-negara tujuan ekspor.

Selain itu, lanjut dia, berdasarkan riset penulis (2010) di Bali dan Kalimantan Barat menunjukkan bahwa ikan-ikan yang di ekspor adalah ikan-ikan berkualitas 1 dan 2, sementara untuk konsumsi dalam negeri berkualitas 3 ke bawah. “Pada perkembangan 20 jenis produk ekspor ikan dan produk perikanan Indonesia tahun 2012, kelompok crustacea dan pelagis masih menjadi andalan utama produk ekspor Indonesia,” ungkap Suhana dalam diskusi bertajuk Kelautan dan Perikanan, Evaluasi 2012 dan Proyeksi 2013 di Jakarta Selatan, Kamis (20/12).

PERPUSTAKAAN PRIBADI

Alamat Elektronik : <http://suhana-ocean.blogspot.com> dan <http://pk2pm.wordpress.com>

Email : suhanaipb@gmail.com, HP 081310858708

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Untuk kapasitas produksi terpakai pada industri perikanan Indonesia periode 2008 – triwulan III 2012, dalam penelitian Suhana, menunjukkan meningkatnya ikan impor belum berdampak pada meningkatnya kapasitas industri perikanan nasional. Hal ini berarti impor ikan yang kabarnya diperuntukkan buat industri pengolahan dalam negeri tidak terbukti. “Kemana larinya ikan impor?” tanya Suhana.

Yang sangat ironis, menurut Suhana, banyak bayi kekurangan gizi di sentra perikanan nasional. “Dokumen BAPPENAS (2010) menunjukkan bahwa bayi yang masih kekurangan gizi masih sangat tinggi, terutama di provinsi-provinsi berbasis sektor kelautan dan perikanan. Misalnya Maluku (27,8%), Maluku Utara (22,8%), Nusa Tenggara Timur (33,6%), Nusa Tenggara Barat (24,8%), Sulawesi Tenggara (27,6%), Papua (21,2%), Papua Barat (23,2%), Gorontalo (25,4 %), Riau (21,4%), Kalimantan Barat (22,5%), dan Kalimantan Timur (19,3%),”sebut Suhana.

Menurut dia, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Semester II/2011 silam menyuguhkan adanya permasalahan Minapolitan Tahun Anggaran 2009, 2010 dan Semester 1 2011, yakni penetapan kawasan Minapolitan tidak memperhatikan kondisi kesiapan daerah, pengadaan Kapal Pole Line Fiberglass 30 GT tidak sesuai ketentuan sehingga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3.394.450.292, dan peningkatan produksi perikanan melalui transpormasi penggunaan kapal tradisional ke kapal Inka belum efektif.

Selain itu, pelaksanaan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) tahun 2011 belum berjalan efektif, perencanaan pembangunan pabrik rumput laut berpotensi tidak efektif, upaya peningkatan kualitas hasil perikanan melalui program sistem rantai dingin belum efektif, serta pengelolaan kawasan minapolitan belum memperhatikan aspek lingkungan. “Berdasarkan kondisi temuan BPK tersebut Kebijakan Minapolitan tidak berjalan efektif dikarenakan tidak melalui perencanaan yang matang dan cermat,” jelas Suhana.

(munib)

Sumber : <http://www.neraca.co.id/2012/12/20/ekspor-dan-impor-ikan-sama-sama-bermasalah/>

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Di Laut Kita Tak Berdaya

Tumpang tindih aturan dan banyaknya instansi yang terlibat dalam pengamanan laut justru menyebabkan tidak efektifnya pengamanan wilayah perairan Indonesia. Kerugian akibat berbagai bentuk pencurian di laut diperkirakan mencapai Rp 200 triliun pertahun.

Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL Armada Kawasan Timur (Armatim) saat melakukan patroli laut dengan menggunakan combat boat untuk pengamanan laut di wilayah timur Indonesia dan antisipasi kejahatan jalur laut serta menjaga keutuhan NKRI di perairan Surabaya, Jatim, Selasa (6/9).

Laksamana Madya Didik Heru Purnomo mengaku harus terus memutar otak agar bisa mengkoordinasikan 12 instansi yang terlibat dalam pengamanan laut. Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut tersebut mengaku masih kesulitan mengkoordinasikan belasan pemangku kepentingan yang tergabung di dalam Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) itu.

Menurut jenderal bintang tiga TNI Angkatan Laut itu perlu strategi khusus untuk mengkoordinasikan mereka. "Sebab tidak semua aparat menyadari pentingnya koordinasi dan menghilangkan ego sektoral," katanya, Kamis pekan lalu. Selain ego sektoral, menurut dia, peraturan tentang keamanan di laut jumlahnya terlalu banyak, ada 33 peraturan sehingga tumpang tindih.

Sependapat dengan Didik, Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri menyebut akibat ego sektoral dan tumpang tindihnya peraturan pengamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia menjadi lemah sehingga pencurian ikan merajarela.

Menurut Rokhmin pencurian ikan justru dilakukan oleh kapal-kapal berbendera Indonesia. Pengusaha Indonesia yang menjadi pemilik kapal tersebut memperjualbelikan ijin penangkapan ke pengusaha asing. "Total kerugian yang kita derita stabil, berkisar di angka Rp 200 triliun per tahun akibat illegal fishing, illegal mining dan illegal trading di laut," katanya.

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Suhana juga mengungkapkan selain ikan, kekayaan laut yang banyak di curi adalah pasir laut, peninggalan benda berharga di bawah laut dan terumbu karang. Dalam perkara pencurian ikan, permasalahan yang terjadi di perairan

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Indonesia tidak hanya mencakup problem klasik pencurian ikan (illegal fishing), tetapi juga masalah perikanan yang tidak dilaporkan (unreported fishing) dan perikanan yang tidak diatur (unregulated fishing). "Kapal ikan asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia didominasi oleh negara Malaysia, Vietnam, Thailand, RRC, dan Philipina," kata Suhana.

Salah satu contoh, Suhana menyebutkan, di provinsi Kalimantan Barat, umumnya kapalkapal milik nelayan Malaysia menangkap ikan di perairan kabupaten Sambas, yang menjadi perbatasan Indonesia dan Malaysia pada malam hari. Menjelang pagi hari kapal-kapal tersebut kembali masuk ke perairan Malaysia dan mendaratkan ikannya di pelabuhan perikanan yang ada di sekitar wilayah Kuching Malaysia. "Dari Kuching, ikan-ikan hasil tangkapan nelayan Malaysia tersebut di ekspor ke Indonesia melalui jalur darat," papar Suhana.

Wakil Ketua Komisi IV DPRRI yang membidangi Kelautan dan Perikanan, Ibnu Multazam mengatakan pencurian terbesar yang terjadi di perairan Indonesia adalah pencurian ikan. Ibnu mengatakan untuk mengantisipasi dan meminimalisir pencurian tersebut, nelayan-nelayan tradisional seharusnya dibekali kapal yang berukuran lebih besar ketika melaut sehingga dapat berlayar lebih jauh dari garis pantai. "Nelayan tradisional harus dilibatkan dalam pengamanan laut kita," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Selain keterlibatan nelayan, Ibnu menyarankan pemerintah segera membentuk coast guard untuk pengamanan laut Indonesia sehingga ada satu komando yang tegas. Pencurian besar-besaran di perairan Indonesia menurut Ibnu terjadi karena terlalu banyak instansi yang menangani dan tumpang-tindihnya peraturan. "Karena terlalu banyak yang turun tangan justru menjadi tidak aman," ujar Ibnu.

Menteri Kelautan dan Perikanan pertama, Sarwono Kusumaatmadja mengatakan untuk pengamanan laut saat ini diserahkan ke Bakorkamla. Namun menurut Sarwono, Bakorkamla hanyalah lembaga koordinasi yang tidak bisa melakukan eksekusi. Akibatnya jika ada suatu insiden atau ada pelanggaran di wilayah perairan nusantara, Bakorkamla harus berkoordinasi terlebih dahulu dan tidak bisa segera mengambil tindakan. "Jadi selalu kalah cepat," ujar Sarwono.

Sumber : <http://www.prioritasnews.com/2012/06/05/di-laut-kita-tak-berdaya/>

Edisi 21 - Tahun 1 | 04 - 10 Juni 2012

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Kompensasi Tambahan bagi Nelayan Sedang Diusulkan

JAKARTA, KOMPAS - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo di Jakarta, Rabu (7/3), mengemukakan, subsidi bahari bakar minyak bagi nelayan tetap akan diberikan. Pihaknya juga sedang mengusulkan bantuan tambahan nelayan sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal ini karena mayoritas dari total 2,7 juta nelayan di Indonesia termasuk kategori penduduk miskin. Dana kompensasi itu berupa bantuan langsung. Setiap tahun, kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan sebanyak 2,1 juta kiloliter, tetapi yang disetujui pemerintah rata-rata hanya 1,8 juta kiloliter. Adapun biaya BBM mencapai 60-70 persen dari semua biaya operasional kapal selama melaut. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan Dedy Sutisna menambahkan, dana kompensasi bagi nelayan diusulkan berupa tambahan dana pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) perikanan tangkap senilai Rp 2,7 triliun. Dana tunai itu dihitung berdasarkan asumsi kenaikan harga setiap liter solar bersubsidi sebesar Rp 1.500 dengan jumlah pasokan bagi nelayan 1,8 juta kiloliter.

Tahun 2012, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan penyaluran PUMP perikanan tangkap sebesar Rp 370 miliar untuk 3.700 kelompok nelayan. Setiap kelompok memperoleh dana Rp 100 juta.

Sebelumnya, sejumlah nelayan di Tanah Air menolak rencana kenaikan harga BBM.

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana menilai, kompensasi berupa dana tambahan PUMP dikhawatirkan tidak akan efektif.

"Penerima PUMP perikanan tangkap selama ini tidak jelas, banyak yang tidak menyentuh sasaran nelayan kecil," ujar Suhana. Kompensasi akan lebih efektif jika diwujudkan berupa pembangunan stasiun pengisian bahan bakar minyak nelayan serta peningkatan pengawasan distribusi BBM. fl-KTi

Sumber: KOMPAS 8 Maret 2012, Hal, 18

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

**Keberhasilan Konservasi Laut Bukan Ditentukan Lewat Besarnya Dana
Bantuan Asing**

July 8, 2012 | Filed under [Politik](#) | Posted by [ardinanda](#)



“Keberhasilan kawasan konservasi bukan ditentukan oleh besarnya dana bantuan asing.” Ungkap Suhana, Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim. Seharusnya pemerintah belajar dari program Coremap yang cenderung tidak berhasil dalam membentuk kawasan konservasi laut, padahal dana Coremap adalah hutang luar negeri Indonesia.

Pemerintah sebaiknya memberdayakan masyarakat adat Indonesia. “Mereka mempunyai pengalaman mengelola sumberdaya berkelanjutan tanpa dukungan dana besar.” tutupnya menanggapi peluncuran Program Tata Kelola Wilayah Laut yang dilindungi (MPAG) dan pemberian bantuan sejumlah \$ 6.000.000 dari Amerika Serikat untuk membantu Indonesia mengembangkan secara efektif 20 juta hektar sumber daya laut dan pesisir di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), (05/07/12). Peluncuran program ini dihadiri Duta Besar AS Scot Marciel, Wakil Administrator Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) Donald Steinberg, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo.

Sumber : <http://www.kepadamu.com/2012/07/keberhasilan-konservasi-laut-bukan-ditentukan-lewat-besarnya-dana-bantuan-asing/>

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Industri Perikanan Bergantung pada Asing

Jakarta, Kompas – Ketergantungan sektor kelautan dan perikanan pada asing masih tinggi sepanjang tahun 2012. Hal itu tecermin dari tingginya impor ikan, beroperasinya kapal ikan eks asing, hingga investasi perikanan yang didominasi asing.

Demikian paparan Sekretaris Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik serta Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana, di Jakarta, Jumat (21/12).

Lapangan kerja di sektor perikanan dikuasai pihak asing, yang tecermin dari dominasi anak buah kapal asing di atas kapal-kapal berbendera Indonesia. Pemerintah terkesan membiarkan kapal-kapal ikan yang terindikasi milik asing itu menerapkan praktik bendera ganda, yakni menggunakan bendera Indonesia sewaktu menangkap di perairan Indonesia, tetapi tangkapan langsung diangkut ke luar negeri tanpa pernah didaratkan di pelabuhan.

Temuan Kiara di perairan Natuna, Kepulauan Riau, tahun 2012, kapal-kapal eks asing menggunakan hingga 99 persen anak buah kapal asing dan hanya 1 persen anak buah kapal asal Indonesia. Bahkan, nakhoda kapalnya pun warga negara asing.

"Dominasi anak buah kapal asing telah menutup ruang bagi masyarakat untuk menambah lapangan kerja. Ini menyalahi instruksi presiden untuk propenciptaan lapangan kerja," ujarnya.

Suhana mengemukakan, investasi asing masih mendominasi sektor perikanan. Hingga triwulan III-2012, nilai investasi asing mencapai Rp 219,96 miliar. Adapun investasi berupa penanaman modal dalam negeri hanya Rp 14,36 miliar. (LKT) Kompas, Sabtu, 22 Desember 2012

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Negara Kelautan Pengimpor 1,8 Juta Ton Garam

Oleh: Suhana

Sebulan lebih masalah garam nasional menjadi perbincangan publik, baik di media massa maupun dalam forum-forum diskusi lainnya, seperti di pertemuan *focus group discussion* (FGD) kantor *Sinar Harapan* pekan lalu.

Kisruh garam diawali dengan banjirnya garam impor legal maupun ilegal di awal 2011. Akibatnya harga garam petani anjlok. Garam impor memang sangat menekan para petani garam nasional, karena di beberapa sentra garam saat ini sedang panen raya.

Akan tetapi pada 2010 harus diakui garam impor sangat diperlukan untuk memenuhi konsumsi garam nasional. Proses produksi garam yang masih mengandalkan proses alami dari panas sinar matahari telah menjadi kendala ketika cuaca buruk, seperti yang terjadi sepanjang 2010.

Produksi garam nasional pada 2010 hanya mencapai 30.000 ton, sehingga pemerintah mengimpor lebih dari 2,1 juta ton guna memenuhi kebutuhan nasional. Rata-rata impor garam nasional setiap tahunnya mencapai 1,8 juta ton (UN Comtrade 2010).

Kisruh garam impor terjadi karena pemerintah tidak konsisten dan tegas menerapkan Surat Keputusan Menperindag No 360/MPP/Kep/5/2004 yang mengatur tentang (1) kewajiban bagi industri yang mengimpor garam (importir terdaftar garam) untuk membeli 50 persen kebutuhannya dari garam lokal terlebih dahulu, (2) dilarang mengimpor garam pada masa tertentu (satu bulan sebelum panen, selama panen, dan dua bulan setelah panen garam rakyat), serta dilarang mengimpor garam bila harga garam rakyat terlalu rendah (di bawah Rp 145.000 per ton untuk mutu K1, Rp 100.000 per ton untuk K2, dan Rp 70.000 untuk K3). Kenyataan di lapangan, SK Menperindag tersebut tak laku.

Mutu Rendah

Sebagian besar masyarakat mempertanyakan kenapa Indonesia yang lautnya luas masih mengimpor garam. Seharusnya para pemangku kepentingan (baca: pemerintah) sadar hal itu dan membuat kebijakan pergaraman nasional yang baik.

Catatan penulis menunjukkan tingginya impor garam disebabkan oleh, *pertama*, produksi garam nasional 100 persen masih mengandalkan panas matahari. Proses

PERPUSTAKAAN PRIBADI

Alamat Elektronik : <http://suhana-ocean.blogspot.com> dan <http://pk2pm.wordpress.com>

Email : suhanaipb@gmail.com, HP 081310858708

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

produksi garam nasional yang masih sangat tradisional tersebut menjadi pemicu rendahnya produksi garam nasional.

Sampai saat ini tidak dikembangkan teknologi tepat guna dan ekonomis yang dapat diaplikasikan oleh para petambak garam. Akibatnya, produksi garam nasional masih sangat tergantung pada kondisi cuaca, kalau panas matahari cukup, produksi garam meningkat dan sebaliknya.

Penulis menilai pemerintah tidak serius membenahi proses produksi garam nasional. Seharusnya sejak lama pemerintah dan perguruan tinggi dapat mengembangkan berbagai teknologi tepat guna dan ekonomis bagi para petani garam, namun hal itu hanya berhenti di angan-angan. Bahkan ketika ditanyakan pada kalangan perguruan tinggi dan pemerintah: adakah ahli garam di Indonesia? Jawabannya, banyak yang tidak tahu siapa ahli garam yang ada di negara bahari ini.

Kedua, garam yang diproduksi petambak tradisional kualitasnya rendah, sehingga para pengusaha lebih menyukai garam impor yang berkualitas tinggi namun harganya murah.

Secara hukum ekonomi perilaku pengusaha garam nasional tersebut dapat dibenarkan. Meskipun demikian, tanpa adanya pembinaan yang baik terhadap para petambak garam nasional agar mutu produksi mereka meningkat, sama saja dengan membiarkan mereka terus terpuruk.

Perlu Kebijakan Tuntas

Ada tiga hal pokok yang sering menjadi masalah bagi petani garam, yaitu harga, mutu, dan distribusi produk. Kalau kita lihat saat ini, penentuan harga garam di tingkat petani lebih banyak ditentukan pada mekanisme pasar, walaupun dalam SK Menperindag Tahun 2004 telah ditentukan patokan harga di tingkat titik pengepul (*collecting point*) di sentra-sentra garam rakyat.

Penentuan harga dalam realisasinya belum dilaksanakan, tidak dilakukan secara konsisten dan konsekuen meskipun telah ditetapkan dan diatur keputusan pemerintah.

Belum adanya standardisasi mutu yang baku dan disepakati pemangku kepentingan terkait, setidak-tidaknya oleh petani garam dan pihak produsen garam olahan, sangat merugikan petani.

Selama ini penentuan mutu oleh produsen secara sepihak berdasarkan hasil visualisasi produk. Petani garam tidak mengetahui secara pasti spesifikasi teknis

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

kelas mutu dan harga yang berlaku. Keterbatasan akses informasi dimanfaatkan produsen dalam penentuan mutu produk garam petani.

Sementara itu, upaya untuk meningkatkan mutu dan jumlah garam rakyat yang diproduksi juga mengalami banyak kendala, antara lain makin buruknya mutu air laut sebagai bahan baku pembuatan garam, makin sempit dan kecilnya petak-petak ladang garam karena kepemilikan per orang/penguasaan lahan yang terbatas, bersaing dengan penggunaan lahan yang lebih produktif, lamanya musim hujan dan tingginya curah hujan pada waktu tertentu, dan makin tingginya biaya produksi di saat harga garam rakyat jatuh.

Berdasarkan hal tersebut, kisruh garam impor ini hendaknya dijadikan pintu masuk untuk memperbaiki kebijakan pergaraman nasional yang saat ini masih sangat amburadul. Perlu ada kebijakan yang tuntas guna memperbaiki kondisi pergaraman dan kesejahteraan petani garam nasional.

Petani garam tidak hanya memerlukan kucuran anggaran bantuan modal saja, tetapi perlu juga didukung kebijakan lainnya seperti perbaikan kualitas perairan laut nasional sebagai bahan baku para petani garam.

Selain itu juga peran perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset milik pemerintah lainnya perlu dioptimalkan guna menghasilkan teknologi-teknologi tepat guna dan ekonomis dalam mendukung produksi garam nasional.

Alhasil, tanpa adanya kebijakan yang tuntas, yang melibatkan semua sektor, penulis khawatir kisruh garam impor ini hanya akan berakhir tanpa ada perbaikan yang berarti bagi para petani garam nasional. Dengan begitu, garam impor akan terus menghantui para petani garam nasional.

URL Source: <http://www.sinarharapan.co.id/content/read/negara-kelautan-pengimpor-18-jut>

Suhana **Penulis adalah Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.*

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Sektor Perikanan | Kerugian Negara Mencapai 80 Triliun Rupiah

KKP Gagal Tangani Kasus Pencurian Ikan

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan dinilai tidak serius menangani tindak pencurian ikan (illegal fishing). Akibatnya, negara dirugikan 80 triliun rupiah selama dua tahun terakhir.

"Perhatian KKP dalam penanganan illegal fishing sangat minim. Jadi, tidak mengherankan jika tindak pencurian ikan semakin marak," kata Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Suhana, kepada Koran Jakarta, Selasa (15/5).

Ketidakterseriusan penanganan pencurian ikan, kata Suhana berdampak rendahnya kontribusi produksi perikanan di dalam negeri dalam menyuplai bahan baku industri. Akibatnya, KKP terpaksa menggulirkan industrialisasi berbasis bahan baku impor.

"Kalau pencurian ikan atau illegal fishing bisa ditekan, berarti tangkapan bisa kembali ke pasar. Selama ini, bahan baku untuk konsumsi dan industri meningkat dan belum terpenuhi. Akibat minimnya ketersediaan bahan baku, jangka pendek kita penuh dari impor," kata Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP, Saut P Hutagalung.

Saut menyebut, sejak Januari hingga April 2012, realisasi impor mencapai 15 persen dari kuota impor tahun 2012 yang 600 ribu ton. Kuota impor tersebut meningkat 200 ribu ton dibandingkan tahun lalu yang hanya 400 ribu ton. Jadi, tantangannya, kata Saut, jika pencurian ikan bisa ditekan, ketersediaan bahan baku meningkat.

Berdasarkan data Organisasi Pangan Dunia (FAO), rata-rata potensi kerugian negara dari tindakan illegal fishing mencapai 30 triliun rupiah. Jika satu kilogram ikan dihargai 10 ribu rupiah, volume tangkapan ikan yang dicuri per tahun setara tiga juta ton.

Angka pencurian tersebut cukup besar. Pasalnya, tahun ini saja potensi hasil tangkapan perikanan hanya 5,2 juta ton. Dari jumlah tangkapan tersebut, kata Saut, rata-rata hanya 80 persen yang bisa digunakan untuk bahan baku industri pengolahan, sementara 20 persen tidak bisa dijadikan bahan baku karena kualitas yang tidak memenuhi standar. Bahkan untuk lokasi penangkapan yang

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

jauh dari fasilitas pengolahan, hasil tangkapan yang bisa digunakan untuk bahan baku industri hanya 70 persen.

"Jadi, kapasitas produksi industri pengolahan saat ini rata-rata hanya 50–60. Karena kurang bahan baku, ya kita penuh dari impor. Dari total impor 600 ribu ton, 35 persen impornya berupa tepung ikan dan sisanya impor untuk jenis ikan makarel, lemuru, dan sarden," ungkap dia. Lebih lanjut, Saut menyebut jika pengawasan dan penanganan pencurian ikan lebih efisien dan intensif, ketersediaan ikan untuk bahan baku industri akan meningkat. Selain itu, produksi perikanan budi daya harus ditingkatkan karena sejauh ini target peningkatan produksi 38 persen di tahun 2014 sulit direalisasikan. Bahkan permintaan konsumsi dan bahan baku industri saat ini lebih cepat dibandingkan angka peningkatan produksi.

"Kenaikan produksi kita tidak cukup untuk mengejar permintaan bahan baku industri. Buktinya, tahun ini impornya naik dari 400 ribu menjadi 600 ribu ton," jelas dia. Jadi, ke depan, jika penanganan illegal fishing belum maksimal, ketersediaan bahan baku industri perikanan sulit dipenuhi, dan efeknya, penyerapan tenaga kerja di pengolahan perikanan tidak maksimal.

Tunggu Laporan

Terkait dengan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, mengatakan pihaknya masih menunggu laporan mengenai pencurian ikan dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Perikanan (PSDKP). Hingga saat ini, data mengenai pencurian ikan masih bermasalah dan tidak sinkron.

"Kita banyak mendapatkan laporan, dan kita juga sudah banyak menangkap pencurian ikan. Kita memiliki potensi tangkapan dengan populasi ikan 6,4 juta ton, kuota tangkapannya 5,4 juta ton. Kalau memang potensi itu benar, masih bisa mengejar itu. Tetapi memang masalah kita itu soal data," ujar dia. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Agung, M Hatta Ali, mengatakan dari tindak pidana yang sedang ditangani pengadilan perikanan dua tahun terakhir yang berjumlah 204 kasus, di antaranya terjadi pada 2010 sebanyak 138 kasus dan pada 2011 sebanyak 66 kasus. "Sebanyak 196 perkara di antaranya telah ditangani di pengadilan perikanan baru. Kerugiannya ditaksir mencapai 80 triliun rupiah," tegas dia. aan/E-3

Sumber : <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/91174>

Jumat, 18 Mei 2012 | 00:07:45 WIB

PERPUSTAKAAN PRIBADI

Alamat Elektronik : <http://suhana-ocean.blogspot.com> dan <http://pk2pm.wordpress.com>

Email : suhanaipb@gmail.com, HP 081310858708

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Sabtu, 09 Juni 2012 | 00:12:19 WIB

Importasi Ikan

DPR Akan Inspeksi Praktik Impor Ilegal

JAKARTA - Komisi IV DPR berencana melakukan inspeksi di daerah-daerah yang diduga menjadi tempat praktik impor secara ilegal. Hal ini dilakukan seiring dengan adanya dugaan ketidakberesan dalam prosedur impor ikan. "Kami akan mengawasi impor ikan itu, sudah ada laporan dari pengusaha yang mengeluh dikenai pungutan. Seharusnya KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), yang memberikan kuota impor juga melakukan peninjauan, apakah importir ikan itu memiliki coldstorage berupa penampungan ikan atau tidak," kata Anggota Komisi IV DPR, Sudin, kepada Koran Jakarta, Jumat (8/6). Sudin menyebut, seharusnya importir wajib memiliki coldstorage, tetapi yang beredar saat ini, ada (asosiasi) importir yang tidak berbisnis ikan tetapi melakukan jual-beli kuota impor ikan. Kondisi tersebut sangat disayangkan, untuk itu dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan klarifikasi ke lapangan. Menurut Sudin, saat ini juga masih terjadi simpang siur mengenai data terkait kebutuhan importasi ikan untuk bahan baku pemindangan. Ia menyebut di Jawa Timur dan Jawa Tengah terjadi kekurangan bahan baku ikan untuk pemindangan. Akan tetapi justru ada asosiasi yang merekomendasikan penghentian impor.

"Sekarang yang seharusnya memberikan rekomendasi importir boleh mengimpor kan dari dinas di provinsi, misalkan saat ini Jawa Timur kekurangan bahan baku pemindangan. Ya dari dinas, bukan asosiasi yang memberikan rekomendasi," ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Suhana mengatakan, selama ini importasi ikan cenderung tertutup. Indikasinya terlihat dengan tidak adanya kuota yang jelas, serta kapan ikan impor diperbolehkan masuk ke Indonesia.

"Impor ikan terlihat berlangsung sepanjang tahun, itu terjadi karena belum ada transparansi mengenai kebutuhan. Misalkan berapa kebutuhan semester ini? Saya juga mempertanyakan angka proyeksi impor ikan 600 ribu ton yang dimunculkan," ungkapnya.

PERPUSTAKAAN PRIBADI

Alamat Elektronik : <http://suhana-ocean.blogspot.com> dan <http://pk2pm.wordpress.com>

Email : suhanaipb@gmail.com, HP 081310858708

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Seharusnya, kata Suhana, data importasi ikan dibuka seperti impor daging yang dilakukan Kementerian Pertanian, jadi disebutkan kebutuhan impor daging setiap semester dan tingkat realisasinya impornya.

Menurut Suhana, selama ini aturan hanya diberlakukan untuk ekspor yakni di undang-undang perikanan pasal 25 B, yang mengamanatkan bahwa ekspor produk perikanan diperbolehkan ketika produksi sudah mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Kalaupun ada pengendalian impor yang dikeluarkan KKP, itu masih belum diimplementasikan di lapangan.

Sementara itu Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP Saut P Hutagalung mengatakan, KKP sudah memiliki Peraturan Menteri No 15 menyebutkan importir harus memiliki usaha perikanan sebelum mendapatkan rekomendasi impor.

"Masalahnya sekarang, masih ada yang lolos menjadi importir walaupun mereka trader. Tetapi kita sudah lakukan verifikasi ulang, di Muara Baru kita punya data importir dan kita lakukan cek ulang. Kalau mereka tidak memiliki pabrik, coldstorage atau unit usaha maka tidak akan dapat rekomendasi importasi lagi," ungkapnya. aan/E-3

Sumber : <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/92903>

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Monday, 13 February 2012 | 14:55 WIB

WASPADAI KISRUH IMPOR GARAM JILID II

Petinggi Pemerintah Harus Sepakat Soal Garam

Jakarta – Di tengah sikap tegas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menolak impor garam konsumsi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) justeru sedang bersiap-siap membuka keran impor garam hingga 700 ribu ton mulai Maret mendatang. Perbedaan sikap dua kementerian bidang ekonomi ini berpotensi memicu kisruh impor garam jilid II pasca geger impor sebelumnya (jilid I) antara mantan Menteri KKP Fadel Muhammad dan mantan Mendag Mari E. Pangestu pada 2011 lalu.

Menanggapi hal itu, Anggota Presidium Aliansi Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (A2PGRI) Faisal Baidowi mengungkapkan, untuk mengisi data garam yang tidak akurat, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan harus duduk bersama untuk menyelesaikan kisruh garam. “Karena garam konsumsi dan garam industri sangat dibutuhkan oleh rakyat. Jadi, ketiga kementerian itu harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah data garam yang berbeda-beda dan rencana kebijakan impor yang menimbulkan kontroversi ini,” ujar Faisal kepada *Neraca*, Senin (13/2).

Dihubungi terpisah, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengungkapkan, impor garam untuk kebutuhan konsumsi sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mengacu pada Permendag Nomor 44/2007 tentang Ketentuan Impor Garam, lanjut Deddy, saat ini Importir Produsen (IP) garam iodisasi sudah berhak mengimpor garam, karena masa larangan impor garam ini berlangsung selama satu bulan sebelum masa panen dan dua bulan setelah masa panen.

“Perlu dicatat, yang menentukan impor atau tidak terkait garam konsumsi adalah Kementerian Perdagangan. Kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan usul boleh saja,” ungkap Deddy lewat surat elektronik, kemarin. Lebih lanjut Deddy menjelaskan, hasil survei PT Sucofindo menunjukkan stok garam yang ada di petani hanya 310.000 ton. “Artinya jumlah ini cuma cukup memenuhi kebutuhan konsumsi hanya sampai bulan ini. Minggu-minggu ini akan dirapatkan lagi di Kantor Kemenko Perekonomian mengenai impor garam. Kita sudah berulang kali

PERPUSTAKAAN PRIBADI

Alamat Elektronik : <http://suhana-ocean.blogspot.com> dan <http://pk2pm.wordpress.com>

Email : suhanaipb@gmail.com, HP 081310858708

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

melakukan rapat mengenai impor, namun belum diputuskan tentang volume impor,” imbuhnya.

Di samping itu, Deddy juga mencontohkan, jika panen raya garam baru berlangsung Juli dan Agustus, maka kebutuhan impor garam untuk menunggu panen kira-kira 5 bulan ke depan diperkirakan mencapai 700.000 ton, dengan asumsi kebutuhan garam per bulan 150.000 ton-170.000 ton. “Berdasarkan data BPS, jumlah ini terhitung masih sedikit ketimbang impor garam tahun lalu yang sekitar 2,84 juta ton,” terangnya.

Terkait hal itu, Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana menjelaskan, perbedaan data KKP dan Kemendag soal garam konsumsi tidak perlu diperdebatkan. Menurut dia perbedaan data KKP dan Kemendag mestinya bisa dipadukan sehingga dapat menyusun strategi kapan baiknya melakukan impor garam dan kapan impor distop. “Impor garam masih dibutuhkan untuk kebutuhan industri, kalau untuk kebutuhan rumah tangga sudah cukup disediakan oleh produksi dalam negeri. Karena sepengetahuan saya produksi garam nasional belum mampu memenuhi total kebutuhan garam, karena sistem produksi garam kita masih tergantung sama kondisi cuaca,” terang Suhana.

Sementara ketika dimintai komentar soal polemik impor garam antara KKP dan Kemendag, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) KKP Sudirman Saad mengaku enggan berkomentar. “Maaf soal impor garam saya tidak bisa beri info karen urusannya perdagangan (Kemendag),” jawabnya melalui pesan singkat, Senin.

Terkait dengan sikap Menteri KP Sharif Cicip Sutardjo yang *kekeuh* tidak mau impor garam konsumsi di tengah kebijakan Kemendag untuk mengimpor garam, Sudirman pun enggan melontarkan pendapat. “KKP 2012 fokus untuk berdayakan: 29.746 petambak garam, 16,5 ribu hektar di 40 kabupaten, produktivitas 80 ton/ha/musim,” beber Sudirman. Pemerintah, yang terdiri dari KKP, Kemendag, Kemenperin, BPS maupun Kementerian Koordinator Perekonomian sedianya bakal mengadakan rapat gabungan pada 9 Februari 2012. Namun lantaran Menko Perekonomian Hatta Rajasa sedang keluar kota, rapat koordinasi garam itupun urung dilaksanakan. “Kesepakatannya dalam minggu ini (akan digelar pertemuan),” pungkasnya.

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

sumber : <http://www.neraca.co.id/2012/02/13/petinggi-pemerintah-harus-sepakat-soal-garam/>

PERPUSTAKAAN PRIBADI

Alamat Elektronik : <http://suhana-ocean.blogspot.com> dan <http://pk2pm.wordpress.com>
Email : suhanaipb@gmail.com, HP 081310858708

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Tuesday, 13 November 2012 | 12:36 WIB
INDUSTRIALISASI SEKTOR KELAUTAN
Aktivis Perikanan Sesalkan Dominasi ABK Asing
NERACA

Jakarta – Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik bersama Kepala Divisi Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM), Suhana, menduga ada mafia di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait dengan terendus dari dua fenomena, yakni sudah gagal menghentikan impor ikan, sekarang mau impor pekerja asing untuk tangkap ikan Indonesia.

Dalam catatan mereka, pada 2010, dalam laporannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pelanggaran oleh KKP karena membiarkan dominasi pekerja asing di atas kapal-kapal ikan yang beroperasi di perairan Indonesia. “Jumlahnya mencapai 80% lebih dari total anak buah kapal (ABK),” kata Riza lewat pesan singkatnya kepada Neraca, Selasa (13/11).

Padahal, lanjut Riza, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 12/2009 tentang Usaha Perikanan, jumlah tenaga kerja asing yang dibolehkan maksimum sebanyak 30% dari total ABK. Dalam Permen tersebut, sambung Riza, antara lain berbunyi “...penerapan peraturan penggunaan tenaga kerja asing pada kapal perikanan oleh Ditjen Perikanan Tangkap belum diimplementasikan secara optimal mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia...”

Lebih jauh Riza mengatakan, dominasi pekerja asing di kapal-kapal ikan juga akan menambah sulit pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan RI dari penjarahan. “Tahun 2012 ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, melalui rancangan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 14/2011 dan Permen-KP No 49/2011 tentang Usaha Penangkapan Ikan, justru ngotot untuk melegalkan dominasi pekerja asing di atas kapal ikan yang beroperasi di perairan RI, bahkan hingga 70% dari total ABK,” cetus Riza.

Di mata Riza, tindakan ini jelas mengabaikan temuan BPK 2010, UU 45/2009 tentang Perikanan, PermenKP Usaha Perikanan Tangkap, dan terlebih Hak tiap-

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

tiap warga negara atas pekerjaan yg layak seperti tertuang pada Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945.

Sementara di sisi lain, sepanjang periode 2009-2011 investasi perikanan meningkat 230% lebih, dalam catatan Riza, kenyataannya industri perikanan hanya mampu menyerap kurang dari 250 ribu orang tenaga kerja (processing labour).

“Itupun, tenaga kerja yang terlibat masih dalam posisi lemah dengan standar penggajian yang rendah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa meningkatnya investasi perikanan belum memberi manfaat bagi kepentingan rakyat, semisal dalam hal meningkatkan serapan tenaga kerja nasional,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut dia, perlu dipastikan pertama, pengurangan hingga penghapusan tenaga kerja asing dalam kegiatan perikanan. Kedua, hilirisasi dimaksudkan dalam rangka optimalisasi pendapatan perikanan dan meningkatkan serapan tenaga kerja nasional.

“Praktik yang berjalan selama ini justru sebaliknya. Alokasi anggaran untuk pelatihan perikanan terus meningkatkan. Namun, lapangan pekerjaan di sektor perikanan (baik diatas kapal maupun pengolahan) justru terbatas,” ungkapnya.

Larangan Ekspor

Sebelumnya, terkait langkah Uni Eropa (UE) telah mencabut larangan ekspor produk perikanan hasil budidaya yang berasal dari Indonesia, Riza memperingatkan, momentum pencabutan larangan ekspor perikanan budidaya Indonesia ke Eropa ini tidak boleh dilihat secara sempit untuk sekedar mendorong peningkatan ekspor ikan Indonesia ke Uni Eropa.

“Apalagi kita ketahui, sejak 18 Oktober 2012 lalu, DPR telah mengeluarkan UU Pangan yang baru dimana mewajibkan pemerintah untuk tidak sembrono mengekspor ikan ke luar negeri sebelum terpenuhinya kebutuhan ikan di dalam negeri. Dan, memang kenyataannya di dalam negeri kita masih membutuhkan ikan, baik untuk konsumsi dan industri nasional,” kata Riza.

Riza menjelaskan, pasokan ikan ke pasar domestik juga mesti diprioritaskan lantaran saat ini tengah terjadi krisis ekonomi di Eropa yang menyebabkan pelambatan dalam berbagai kegiatan ekonomi di Eropa. “Momentum krisis yang terjadi di Eropa harus digunakan untuk memperbaiki hubungan perdagangan kita dengan bangsa-bangsa di Eropa yang selama ini tidak menguntungkan,” tandasnya.

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Dia mencontohkan, melalui Commission Regulation No. 1832/2002 tanggal 1 Agustus 2002, Uni Eropa berhasil mendatangkan 70% bahan baku ikan dari berbagai negara produsen, termasuk Indonesia. “Di antaranya kepiting, lobster, kerang-kerangan. Artinya, produk perikanan yang tidak memberi nilai tambah secara ekonomi. Dan tidak pula menyerap tenaga kerja. Kedua, pada perkembangannya, hambatan ekspor tidak saja bicara tentang perlindungan konsumen terhadap produk perikanan yang sehat (food safety), tapi juga jaminan atas terpenuhinya hak-hak nelayan, pembudidaya, maupun buruh perikanan (sebagai produsen) untuk hidup sejahtera dari proses perdagangan perikanan tersebut,” ungkapnya.

Dalam catatan Kiara, sejumlah industri perikanan, baik di Sumatera, Jawa dan Kalimantan, yang mengekspor produk perikananannya ke Eropa terindikasi kuat masih melakukan praktik perusakan lingkungan, tidak melaporkan tangkapan atau produksi perikananannya secara benar (unreported), hingga tidak memberikan kesejahteraan yang memadai bagi pekerjanya. “Tentu, kita tidak mau kepentingan ekspor ke Eropa justru mengesampingkan kepentingan nasional kita. Yakni, mensejahterakan nelayan, petambak, maupun buruh perikanan,” jelasnya.

(munib)

Sumber : <http://www.neraca.co.id/2012/11/13/aktivis-perikanan-sesalkan-dominasi-abk-asing/>

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Membangun dan Menjaga Pulau Kecil Perbatasan

Suhana* | Jumat, 29 Juni 2012 - 14:37:22 WIB

Dibaca : 70



(dok/antara)Penanganan pulau kecil perlu memperhatikan karakteristik pulau.

Perhatian pemerintah dan masyarakat kepada pulau kecil perbatasan terus meningkat pascakalahnya Indonesia dalam perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan pada 2002.

Bahkan, dalam 10 tahun terakhir perhatian publik terhadap wilayah perbatasan terus meningkat, terutama pada perbatasan Indonesia dan Malaysia. Bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani wilayah perbatasan salah satunya dibentuk badan khusus yang menangani wilayah perbatasan, yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Namun, tingginya perhatian pemerintah dan publik terhadap masalah perbatasan ternyata belum diikuti dengan kemampuan pengelolaan sumber daya wilayah perbatasan, khususnya pulau kecil perbatasan.

Selain itu, pengelolaan pulau kecil perbatasan terlihat belum optimal, bahkan beberapa program pembangunan di wilayah tersebut terlihat belum mempertimbangkan karakteristik pulau tersebut. Akibatnya, pembangunan pulau kecil perbatasan cenderung akan merusak keberadaan pulau dibandingkan dengan menjaga keutuhan pulau tersebut.

PERPUSTAKAAN PRIBADI

Alamat Elektronik : <http://suhana-ocean.blogspot.com> dan <http://pk2pm.wordpress.com>

Email : suhanaipb@gmail.com, HP 081310858708

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Berdasarkan pengamatan di lapangan (2012), khususnya di Pulau Fani, Kabupaten Raja Ampat (Titik Dasar Kepulauan Nomor 066A), terlihat pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik pulau itu.

Misalnya pertama, pembangunan rumah untuk penduduk. Pemerintah daerah sejak 2009 telah melakukan pembangunan sekitar 42 rumah panggung yang diperuntukkan penghuni pulau tersebut.

Penduduk yang ada di Pulau Fani merupakan penduduk dari Desa Reni, yang letaknya sekitar empat jam perjalanan dari pulau tersebut.

Penduduk tersebut datang ke Pulau Fani hanya untuk berkebun kelapa dan mengolah kelapa menjadi kopra. Umumnya para penduduk tersebut berada di Pulau Fani hanya dalam waktu empat bulan, setelah itu mereka kembali ke Desa Reni.

Kedua, pembangunan tanggul pantai yang dilakukan pemerintah daerah belum sesuai dengan karakteristik pulau tersebut.

Tanggul pantai tersebut sudah rusak sebelum dilakukan peresmian. Bangunan tanggul yang dibentuk seperti dinding yang memanjang sepanjang garis pantai tersebut ternyata tidak sesuai dengan kondisi pulau yang terbentuk dari pasir putih, sehingga tanggul sangat rapuh ketika diterjang ombak Samudra Pasifik yang sangat besar.

Ketiga, pembangunan jalan lingkar pulau. Pemerintah daerah terus berupaya melengkapi fasilitas Pulau Fani dengan membangun jalan tembok selebar 2 meter yang rencananya akan mengelilingi seluruh pulau tersebut.

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dan para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Fani dapat dengan mudah berkeliling dan menikmati suasana pulau.

Namun, keberadaan jalan lingkar pulau tersebut justru cenderung akan merusak keberadaan hutan pantai yang ada di Pulau Fani, padahal hutan pantai tersebut merupakan satu-satunya kekuatan yang dibutuhkan dalam menjaga keutuhan pulau tersebut.

Kelestarian

Berdasarkan ketiga hal itu, pemerintah belum mempertimbangkan karakteristik pulau kecil perbatasan dalam melakukan pembangunan di pulau tersebut.

Padahal, pertimbangan karakteristik sebuah pulau sangat diperlukan guna menjaga kelestarian dan keberadaan pulau tersebut di masa yang akan datang,

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

terlebih saat ini pengaruh pemanasan global sangat terasa dampaknya pada peningkatan muka air laut.

Apabila hal ini tidak diantisipasi, pembangunan pulau kecil perbatasan yang tidak memperhatikan karakteristik pulau tersebut akan semakin mempercepat proses tergenangnya pulau kecil oleh air laut atau dengan kata lain mempercepat proses tenggelamnya pulau kecil.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan di pulau kecil perbatasan, yaitu pertama, memetakan secara detail karakteristik setiap pulau kecil perbatasan. Karakteristik pulau kecil hendaknya dijadikan pertimbangan utama dalam melakukan pembangunan di pulau kecil perbatasan.

Kedua, meningkatkan pengawasan terhadap pulau-pulau kecil perbatasan, terutama di wilayah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Berdasarkan catatan para nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di sekitar Pulau Fani, sebelum pulau tersebut dijadikan pos oleh TNI, Pulau Fani dijadikan markas oleh para nelayan Filipina yang melakukan aktivitas pencurian ikan.

Bahkan, jejak aktivitas penangkapan ikan ilegal tersebut saat ini masih terekam dari banyaknya terumbu karang di sekitar Pulau Fani yang hancur akibat bom ikan. Saat ini kondisi terumbu karang tersebut terlihat sudah mulai kembali pulih.

Namun, bongkahan-bongkahan karang yang rusak akibat bom ikan masih terlihat berserakan di dasar perairan. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap pulau-pulau kecil perbatasan sangat diperlukan guna mencegah praktik-praktik ilegal yang dapat mengancam keberadaan sumber daya dan kerugian negara.

Ketiga, dukungan politik anggaran untuk pengawasan sumber daya yang ada di sekitar pulau kecil perbatasan. Aktivitas ilegal, seperti pencurian ikan di sekitar pulau kecil perbatasan sampai saat ini masih kerap terjadi, misalnya di sekitar Pulau Fani.

Namun, aparat Marinir yang menjaga pulau tersebut tidak bisa berbuat banyak, karena sampai saat ini mereka tidak dibekali dengan kapal patroli yang dapat dengan cepat mengejar para pelaku pencurian ikan tersebut.

Para Marinir saat ini hanya dapat memandangi aktivitas pencurian ikan dari Pulau Fani tersebut, tanpa ada kemampuan untuk mengejar para pencuri ikan.

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Berdasarkan hal tersebut, pengawasan pulau kecil perbatasan memerlukan dukungan anggaran yang sangat besar, terutama dalam pengadaan kapal patroli, biaya operasional kapal, dan kesejahteraan para aparat di lapangan.

Dengan melihat pentingnya sebuah pulau kecil perbatasan bagi geopolitik dan geostrategis bangsa Indonesia, maka dukungan politik anggaran dari pemerintah dan DPR sangat diperlukan.

**Penulis adalah Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.*

(Sinar

Harapan)

Sumber : <http://www.shnews.co/detile-3996-membangun-dan-menjaga-pulau-kecil-perbatasan.html>

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Ribuan Pulau Indonesia Belum Terdaftar di PBB

Jurnas.com | NASIB pulau-pulau terluar di Indonesia masih banyak yang belum diperhatikan. Bahkan masih banyak ribuan pulau yang belum diberi nama, serta belum terdaftar resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Data terakhir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru sekitar 13.466 pulau yang bernama dan terdaftar di PBB pada 2010.

Dari pendataan terakhir pada 2011, jumlah pulau berkurang sebanyak 24 pulau, sehingga sekarang total jumlahnya 17.480 pulau. "Itu karena ada perubahan iklim, sehingga ada yang ada beberapa pulau kecil yang tidak terlihat (tenggelam) ," ujar Staf Humas Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP Kusdiantoro kepada *Jurnal Nasional* saat dihubungi, Jumat (10/9).

Jumlah pulau tersebut berbeda dengan pedataan Badan Informasi Geospasial-dulu Bakorsurtanal, yang menyebutkan kini jumlah pulau berkurang menjadi 13.466 pulau. Kusdiantoro mengatakan, perbedaan tersebut hanya pada masalah metodologi yang dipakai. Pihaknya melakukan pendataan saat kondisi air laut surut, sehingga beberapa titik pulau-pulau kecil terlihat.

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Herman Khaeron mengatakan bahwa pemberian nama itu penting. Sementara untuk pendaftaran ke PBB itu juga kewajiban konvensi internasional, untuk menghindari adanya sengketa kepemilikan antarnegara.

Herman mengatakan untuk proses penamaan pemerintah dinilai lamban karena sudah diprogramkan sejak setahun 2005. Ia memahami adanya kesulitan akses untuk menjangkau pulau-pulau yang ada.

Namun begitu, katanya, untuk pendaftaran ke PBB lebih diprioritaskan sebab jika titik-titik koordinat pulau yang ada sudah terdaftar berarti aman dari gugatan. "Karena itu sudah terintegrasi dengan wilayah Indonesia, itu yang terpenting," ujar politisi Partai Demokrat tersebut saat dihubungi.

Dikatakan Herman, sebetulnya secara tradisi setempat, pulau-pulau yang ada sudah memiliki nama lokal, hanya itu belum dikenal secara nasional dan internasional.

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Sementara itu Kepala Riset LSM Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana mengatakan saat ini sudah ada 92 pulau terluar Indonesia yang diakui internasional dan hingga kini tidak ada yang bermasalah. Persoalan yang dihadapi pulau-pulau kecil dan terluar adalah masalah alam dan rawan konflik. Namun, Ia mengatakan yang terpenting dari identitas sebuah pulau adalah titik koordinat. Meskipun nantinya pulau tersebut saat pasang tenggelam, tidak menjadi masalah karena sudah teridentifikasi.

Saat ini, katanya, salah satu contoh pulau yang rawan hilang karena alam adalah Pulau Fani, Kabupaten Raja Ampat, Papua yang berbatasan dengan negara Palau. Berada di Samudera Pasifik, pulau tersebut setiap tahun terkena abrasi sampai 1-2 meter. Sebetulnya, katanya, sudah banyak sebetulnya secara alami pulau-pulau kecil hilang, tapi juga ada karena faktor penambangan pasir seperti kejadian di Kepulauan Riau.

Sumber

:

[http://www.jurnas.com/news/68618/Ribuan_Pulau_Indonesia_Belum_Terdaftar_d
i_PBB/1/Nasional/Politik](http://www.jurnas.com/news/68618/Ribuan_Pulau_Indonesia_Belum_Terdaftar_d_i_PBB/1/Nasional/Politik)

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

22.02.2012 09:26

Manajemen Perikanan Amburadul

Penulis : Suhana*

(foto:dok/ist)

Kisruh impor ikan dalam dua tahun terakhir belum menemukan titik terang dalam penyelesaiannya. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan perikanan nasional semakin amburadul. Amburadulnya manajemen perikanan nasional terlihat dari tidak konsistennya arah kebijakan perikanan nasional. Arah kebijakan perikanan nasional dalam periode Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini terlihat tidak fokus. Pada periode Fadel Muhammad sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, arah kebijakan perikanan lebih menekankan pada peningkatan produksi ikan nasional sampai 353 persen, sehingga pada periode tersebut impor ikan secara tegas diminta untuk dihentikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan gegap gempita meyakinkan publik bahwa kebutuhan ikan nasional dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, jadi tidak perlu impor ikan.

Dukungan publik terhadap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut sangat tinggi. Namun demikian, publik masih belum yakin 100 persen terhadap penghentian impor ikan tersebut karena di lapangan banyak ditemukan ikan-ikan impor yang sudah merembes ke pasar-pasar tradisional.

Memasuki periode Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, arah kebijakan kelautan dan perikanan berubah dari pendekatan produksi ikan menjadi industrialisasi perikanan berbasis unit pengolahan ikan (UPI). Namun demikian, perubahan kebijakan tersebut terlihat tidak didukung perencanaan yang matang.

Hal ini terlihat dari industrialisasi perikanan yang dikembangkan ternyata berbasis di Pulau Jawa yang sudah tidak memiliki dukungan bahan baku ikan. Akibatnya, KKP kembali dengan gegap gempita meyakinkan publik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan pentingnya ikan impor untuk memasok kebutuhan bahan baku UPI nasional, dan akhirnya impor ikan kembali dilegalkan.

PERPUSTAKAAN PRIBADI

Alamat Elektronik : <http://suhana-ocean.blogspot.com> dan <http://pk2pm.wordpress.com>

Email : suhanaipb@gmail.com, HP 081310858708

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Namun demikian, publik—termasuk penulis—tidak yakin ikan yang diimpor tersebut hanya untuk kebutuhan bahan baku UPI nasional, namun banyak yang langsung masuk ke pasar-pasar tradisional. Ketidakyakinan penulis tersebut didasarkan pada hasil analisis terhadap dugaan maraknya impor ikan ilegal yang masuk ke Indonesia tahun 2010.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa dugaan impor ikan ilegal Indonesia dari China pada 2010 mencapai 51,28 persen dari total nilai impor ikan Indonesia dari China. Namun demikian, walaupun impor ikan nasional meningkat, ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kapasitas terpakai pada industri pengolahan ikan nasional.

Hasil survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada periode 2010, kapasitas industri perikanan yang terpakai hanya mencapai di bawah 70 persen, tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya, impor ikan tersebut tidak sepenuhnya diperuntukkan bagi pasokan kebutuhan bahan baku UPI, namun langsung dipasarkan ke pasar-pasar dalam negeri.

Ekspor Ikan Ilegal

Di tengah tingginya laju impor ikan nasional, penulis menemukan data yang menunjukkan aktivitas ekspor ikan ilegal dari Indonesia ke negara lain, khususnya Thailand, semakin tinggi. Data UN-Comtrade (2011) mengindikasikan semakin maraknya ekspor ikan tuna ilegal dari Indonesia ke Thailand. Pada 2000, tercatat dugaan ekspor ikan tuna albacore secara ilegal mencapai 52 persen dari total volume ekspor ikan tuna albacore Indonesia ke Thailand, yaitu 271.419 kg dengan nilai mencapai US\$ 1.070.630.

Sementara itu, pada 2010, dugaan ekspor ikan tuna albacore ilegal ke Thailand semakin meningkat sampai 69,20 persen dari total volume ekspor ikan tuna albacore Indonesia ke Thailand. Volume ekspor ikan tuna albacore ilegal dari Indonesia ke Thailand tahun 2010 diperkirakan mencapai 2.352.724 kg dengan nilai mencapai US\$ 8.326.839.

Pasokan bahan baku ilegal tersebut rupanya dimanfaatkan Thailand untuk memasok kebutuhan bahan baku industri pengolahan ikan yang ada di negara tersebut. Thailand selama ini terkenal di dunia sebagai pemasok utama produk ikan olahan, padahal sekitar 90 persen pasokan bahan bakunya berasal dari Indonesia dan Filipina.

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Hal ini terbukti pada tahun 2010 UN-Comtrade memosisikan Thailand sebagai negara kedua terbesar dunia sebagai pemasok produk ikan olahan setelah China, sementara Indonesia hanya puas di posisi 10 terbesar dunia. Total kontribusi Thailand terhadap total ekspor produk ikan olahan mencapai 20,2 persen, sementara Indonesia hanya berkontribusi 2,7 persen dari total ekspor produk ikan olahan dunia.

Tidak Dinikmati

Berdasarkan hal tersebut, sungguh ironis sumber daya ikan Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti tuna ternyata tidak dinikmati oleh para nelayan dan industri pengolahan ikan dalam negeri. Di sisi lain, Unit Pengolahan Ikan Nasional setiap tahunnya berlomba-lomba terus meningkatkan impor bahan baku ikan pindang dan ikan asin.

Kebijakan pengembangan industri pengolahan ikan pindang dan asin secara besar-besaran oleh KKP menunjukkan bahwa secara sistematis masyarakat Indonesia akan disugahi oleh konsumsi ikan pindang dan ikan asin, di mana nilai kandungan gizinya sangat rendah, bahkan cenderung tidak ada. Sementara itu, ikan segar yang memiliki kandungan gizi baik lebih banyak di ekspor, baik legal maupun ilegal ke pasar internasional. Dengan demikian, sangat wajar apabila kualitas sumber daya manusia Indonesia sulit berkembang dengan baik karena hanya disediakan konsumsi ikan pindang dan ikan asin.

Berdasarkan kondisi tersebut, KKP hendaknya segera mengevaluasi kembali kebijakan industrialisasi perikanan berbasis bahan baku impor. Industrialisasi perikanan yang dikembangkan harus berbasis bahan baku dalam negeri, sehingga pengembangan industri pengolahan ikan jangan dipusatkan di Pulau Jawa, tapi harus dikembangkan di pusat-pusat bahan baku seperti di kawasan Indonesia bagian timur.

Oleh sebab itu, dukungan infrastruktur seperti listrik, bahan bakar minyak, air bersih, dan transportasi antarpulau di kawasan Indonesia bagian timur perlu segera dibenahi.

Sementara itu, untuk menjaga ketersediaan bahan baku sepanjang tahun, pemerintah perlu secepatnya membentuk Bulog Perikanan. Hal ini diperlukan mengingat produksi ikan para nelayan sangat tergantung kondisi cuaca,

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

sehingga keberadaan Bulog Perikanan diperlukan guna mengatur manajemen ketersediaan bahan baku ikan untuk UPI dan kebutuhan konsumsi langsung masyarakat.

Selain itu, pengembangan industrialisasi perikanan hendaknya tidak hanya difokuskan untuk komoditas ikan, tetapi perlu dikembangkan untuk industri pengolahan rumput laut.

Hal ini karena dalam 10 tahun terakhir produksi rumput laut terus menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, bahkan saat ini kontribusinya sudah di atas 60 persen dari total produksi perikanan budi daya. Sementara itu, demi mencegah semakin tingginya kasus ekspor ikan ilegal dari Indonesia ke negara lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu meningkatkan pengawasan di perairan Indonesia. Ini karena dugaan kuat ekspor ikan ilegal tersebut dilakukan di tengah laut oleh para oknum nelayan dan pengusaha perikanan nasional.

Alhasil tanpa adanya perubahan perencanaan pembangunan perikanan yang baik, manajemen perikanan nasional akan semakin amburadul. Oleh sebab itu, KKP perlu segera mereformulasi kebijakan perikanan nasional.

**Penulis adalah Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.*

Sumber : <http://www.sinarharapan.co.id/content/read/manajemen-perikanan-amburadul/>

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Ikan Subsidi dan “Degrowth” Ekonomi Perikanan

Suhana* | Selasa, 11 Desember 2012 – 14:55:48 WIB

Kebijakan ekonomi perikanan sampai saat ini belum menemukan suatu konsep yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan masa depan bangsa dan negara.

Menurut catatan penulis, berbagai kebijakan ekonomi perikanan mulai dari Protekan 2003, Gerbang Mina Bahari, Revitalisasi Perikanan, Minapolitan dan Blue Economic saat ini, semuanya berorientasi pada kepentingan asing, terutama dalam memenuhi kebutuhan negara-negara maju akan sumber daya ikan yang berkualitas tinggi.

Hal ini tercermin dari target indikator kinerja utama Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengedepankan peningkatan volume ekspor ikan dan produk perikanan, dibandingkan perbaikan dan peningkatan pasar dalam negeri. Lebih prihatin lagi, pasokan ikan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara maju tersebut difasilitasi dengan BBM bersubsidi.

Penggunaan BBM bersubsidi untuk usaha perikanan saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Dalam lampiran perpres tersebut dijelaskan bahwa usaha perikanan termasuk yang memiliki yang dimaksud dengan usaha perikanan tersebut adalah (a) Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT dan diberikan kebutuhan BBM paling banyak 25 (dua puluh lima) kiloliter/bulan untuk kegiatan penangkapan ikan; (b) Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran di atas 30 GT dan diberikan kebutuhan BBM paling banyak 25 (dua puluh lima) kiloliter/bulan untuk kegiatan penangkapan ikan; (c) Pembudi daya-ikan kecil yang menggunakan sarana pembudidayaan ikan untuk operasional perbenihan dan pembesaran.

Tingginya kepentingan asing di sektor perikanan tercermin juga dari tingginya nilai investasi asing di sektor kelautan dan perikanan. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM 2012) menunjukkan bahwa sampai triwulan 2 2012, investasi sektor perikanan 94,11 persen dikuasai asing.

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Bahkan, dalam dua tahun terakhir (2010 dan 2011) investasi asing di sektor perikanan mencapai di atas 99 persen. Bahkan, informasi di lapangan menunjukkan kapal-kapal perikanan yang bersumber dari investasi asing tersebut semuanya berbendera Indonesia, hal ini dimaksudkan supaya mereka bisa menikmati BBM bersubsidi yang disediakan pemerintah.

Subsidi perikanan (BBM, pakan, kapal, dll) sampai saat ini penulis masih memandang sangat diperlukan untuk mendukung usaha perikanan nasional, khususnya usaha perikanan kecil dan menengah (UMKM Perikanan).

Dengan adanya subsidi perikanan tersebut diharapkan ikan-ikan yang dihasilkan oleh subsidi perikanan tersebut dapat seratus persen dimanfaatkan dan dinikmati masyarakat Indonesia sendiri, melalui ketersediaan ikan-ikan kualitas baik dengan harga subsidi.

Namun demikian, yang terjadi sampai saat ini ikan-ikan hasil tangkapan nelayan dan perusahaan perikanan skala industri yang telah memanfaatkan BBM bersubsidi sebagian besar diekspor ke pasar-pasar negara maju, seperti Jepang, Uni Eropa dan Amerika Serikat, terutama untuk ikan-ikan kualitas 1 dan 2.

Hasil survei lapangan penulis di beberapa lokasi sentra produksi perikanan menunjukkan bahwa ikan-ikan berkualitas 1 dan 2 rata-rata diekspor ke Jepang, Amerika dan Uni Eropa, sementara ikan kualitas 3, 4 dan ikan asin rata-rata untuk konsumsi restoran dan pasar lokal.

Artinya bahwa selama ini pemerintah secara sistematis telah berperan dalam menyediakan pasokan kebutuhan ikan negara maju dengan memanfaatkan uang rakyat.

Peningkatan Gizi Rakyat

Polanco (2012) menyatakan bahwa konsumsi ikan masyarakat merupakan fungsi dari pendapatan yang dapat dibelanjakan dan harga ikan. Dengan meningkatnya pendapatan atau menurunnya harga ikan maka akan berdampak positif terhadap peningkatan konsumsi ikan masyarakat.

Peran subsidi perikanan adalah untuk menurunkan biaya produksi yang harus ditanggung para nelayan dan pengusaha perikanan. Biaya produksi perusahaan perikanan 60-70 persen merupakan biaya untuk bahan bakar minyak.

Dengan demikian, seharusnya ikan-ikan segar yang berkualitas bagus yang dihasilkan kapal-kapal perikanan bersubsidi tersebut dipasarkan di dalam negeri dengan harga terjangkau (harga subsidi). Ini karena anggaran subsidi BBM

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

tersebut berasal dari uang rakyat, jadi sudah sepantasnya juga ikan hasil produksinya dinikmati rakyat Indonesia.

Selain itu, ketersediaan ikan subsidi berkualitas baik tersebut diperlukan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang saat ini kondisi gizinya sangat mengkhawatirkan, terutama sumber daya manusia di sentra-sentra produksi ikan.

Dokumen Bappenas (2010) menunjukkan bahwa bayi yang kekurangan gizi masih sangat tinggi, terutama di provinsi-provinsi berbasis sektor kelautan dan perikanan.

Misalnya Maluku (27,8 persen), Maluku Utara (22,8 persen), Nusa Tenggara Timur (33,6 persen), Nusa Tenggara Barat (24,8 persen), Sulawesi Tenggara (27,6 persen), Papua (21,2 persen), Papua Barat (23,2 persen), Gorontalo (25,4 persen), Riau (21,4 persen), Kalimantan Barat (22,5 persen), dan Kalimantan Timur (19,3 persen).

Berdasarkan kondisi tersebut sudah saatnya ikan-ikan yang dihasilkan dari subsidi perikanan dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah, yaitu pertama reorientasi kebijakan ekonomi perikanan dari pertumbuhan volume ekspor ikan (growth) ke penurunan volume ekspor (degrowth).

Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 25B Ayat (2) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang secara tegas menyatakan bahwa pengeluaran hasil produksi usaha perikanan ke luar negeri (ekspor) dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional.

Kedua, pemerintah harus menyediakan aturan yang tegas terkait siapa saja yang dapat memanfaatkan BBM bersubsidi di sektor perikanan. Industri perikanan yang akan memanfaatkan BBM bersubsidi diharuskan membuat nota kesepahaman agar ikan-ikan yang dihasilkan industri tersebut 100 persen untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

Industri perikanan nasional harus didorong untuk berkomitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang baik melalui ketersediaan ikan-ikan berkualitas gizi yang baik dengan harga yang terjangkau. Sementara itu, kapal-kapal asing berbendera Indonesia dilarang 100 persen menggunakan BBM bersubsidi.

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Ketiga, tindak tegas para pelaku ekspor dan impor ikan ilegal. Data UN-Comtrade (2011) mengindikasikan semakin maraknya ekspor ikan tuna ilegal dari Indonesia ke Thailand. Pada 2000 tercatat dugaan ekspor ikan tuna Albacore secara ilegal mencapai 52 persen dari total volume ekspor ikan tuna Albacore Indonesia ke Thailand, yaitu mencapai 271.419 kg dengan nilai mencapai US\$ 1.070.630.

Sementara itu, pada 2010, dugaan ekspor ikan tuna Albacore ilegal ke Thailand semakin meningkat sampai 69,20 persen dari total volume ekspor ikan tuna Albacore Indonesia ke Thailand. Volume ekspor ikan tuna Albacore ilegal dari Indonesia ke Thailand tahun 2010 diperkirakan mencapai 2.352.724 kg dengan nilai mencapai US\$ 8.326.839.

Jadi, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan masa depan bangsa melalui “Degrowth” Ekonomi Perikanan dan Gerakan Makan Ikan Segar Produksi Dalam Negeri.

*Penulis adalah Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.

Sumber : Sinar Harapan : <http://www.shnews.co/detile-12072-ikan-subsidi-dan-%E2%80%9Cdegrowth%E2%80%9D-ekonomi-perikanan.html>

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

PDB Perikanan Hingga Juli Tumbuh 6,75%

BY Dyah Yossie Wiranti

JAKARTA (IFT) – Sumbangan produk domestik bruto (PDB) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama Januari hingga Juli tahun ini tumbuh sebesar 6,75% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sharif Cicip Sutardjo, Menteri Kelautan dan Perikanan, mengatakan pertumbuhan PDB KKP lebih tinggi dari pertumbuhan PDB Kementerian Pertanian di periode yang sama yang sebesar 3,42%.

Sharif menjelaskan selain pertumbuhan PDB yang relatif tinggi, ekspor sektor kelautan dan perikanan nasional pada periode Januari-April 2012 juga meningkat sebesar 25% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dia menargetkan PDB kementerian hingga 2014 dapat mencapai Rp 65,84 triliun melalui strategi industrialisasi perikanan. PDB ini mengalami peningkatan sekitar 6,75% dari PDB perikanan pada 2010 yang sebesar Rp 50,7 triliun.

Untuk itu, Sharif menjelaskan kementerian akan berkonsentrasi mendorong produksi dan pendapatan nelayan termasuk mengembangkan wirausaha mandiri lewat strategi industrialisasi kelautan dan perikanan. Menurut dia, melalui strategi industrialisasi kelautan dan perikanan maka nelayan, pembudi daya ikan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah, sekaligus meningkatkan daya saing yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Suhana, Kepala Riset dan Kebijakan Ekonomi Kelautan pada Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, mengatakan peningkatan PDB KKP tahun ini didorong meningkatnya nilai ekspor produk perikanan terutama dari produk tuna dan udang. Ekspor produk perikanan nasional tahun ini ditargetkan US\$ 4,2 miliar, naik 20% dari realisasi ekspor tahun lalu yang sebesar US\$ 3,5 miliar.

Dia menambahkan sumbangan PDB dari sektor kelautan dan perikanan juga berasal dari kenaikan nilai investasi terutama dari investasi asing di sektor ini pada kuartal II. Namun, dia pesimistis PDB sektor kelautan dan perikanan Indonesia bakal mencapai target pada 2014.

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Menurut dia, target itu selalu diusung kementerian sejak 1999 dan sudah melewati beberapa kali pergantian menteri. “Namun tidak pernah tercapai karena antara kebijakan dan praktik di lapangan tidak pernah sinkron,” ujarnya.

Menurut Suhana, target PDB bisa tercapai jika ada penguatan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tapi saat ini masih ada beberapa hambatan, seperti ekspor ilegal yang menghilangkan devisa negara. Dia memberi contoh, pada 2010-2011 ditemukan data ekspor ilegal tuna ke Thailand yang kemudian diolah menjadi bahan baku industri mereka.

“Alhasil Thailand berada di urutan ketiga terbesar dunia untuk produksi tuna, sementara Indonesia hanya berada di posisi sebelas,” ujar dia.

Selain itu, dia juga mengkritisi kebijakan KKP yang mengeksport semua produk perikanan berkualitas, tanpa memperhatikan kebutuhan gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia ke depan. Pemerintah menggenjot ekspor untuk produk perikanan berkualitas dan bernilai tinggi seperti tuna, kakap merah, kerapu. Sementara masyarakat Indonesia hanya diberikan ikan asin dengan kadar garam yang tinggi. (*)

Sumber : <http://www.indonesiainancetoday.com/read/32503/PDB-Perikanan-Hingga-Juli-Tumbuh-675>

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Rekonstruksi Kebijakan Ekonomi Kelautan dan Perikanan Perikanan Nasional

Oleh : Suhana

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan sejak awal reformasi sampai saat ini terlihat belum memberikan hasil yang signifikan terhadap perbaikan ekonomi perikanan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan. Hal ini disebabkan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkembang sejak awal reformasi sampai saat ini hanyalah kebijakan-kebijakan yang terus berulang, padahal sudah terbukti kebijakan tersebut telah mengalami kegagalan.

Kebijakan-kebijakan tersebut hanya berganti nama saja setiap periode pemerintahan. Pada periode pemerintahan Gus Dur, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan mencanangkan program peningkatan produksi ikan atau yang dikenal dengan istilah Protekan 2003. Target dari Protekan 2003 tersebut adalah meningkatkan produksi ikan pada tahun 2003 menjadi 9 juta ton dengan nilai ekspor yang diharapkan mencapai 10 milyar \$ US. Namun demikian, sampai akhir tahun 2003 target tersebut tidak dapat tercapai. Data FAO (2009) menunjukkan bahwa produksi ikan nasional pada tahun 2003 hanya mencapai sekitar 5,8 juta ton dengan nilai ekspor dibawah 1,7 milyar \$ US.

Memasuki periode pemerintahan Megawati, pada tanggal 11 Oktober 2003 kembali dicanangkan Program Gerbang Mina Bahari di Teluk Tomini Provinsi Gorontalo. Target dari program tersebut adalah peningkatan produksi ikan nasional sebesar 9,5 juta ton pada tahun 2006 dengan target nilai devisa ekspor sebesar 10 milyar \$ US. Target program Gerbang Mina Bahari tersebut sama dengan target Program Protekan 2003, namun berbeda nama program saja. Kegagalan yang sama terjadi juga pada program Gerbang Mina Bahari. Data FAO (2009) menunjukkan bahwa produksi ikan nasional pada tahun 2006 hanya mencapai sekitar 6,2 juta ton. Sementara itu nilai ekspor produk perikanan hanya mampu mencapai 2 miliar \$ US.

Periode pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I, pemerintah kembali mencanangkan program serupa dengan nama Revitalisasi Kelautan dan Perikanan. Target dari program Revitalisasi Kelautan dan Perikanan tersebut

PERPUSTAKAAN PRIBADI

Alamat Elektronik : <http://suhana-ocean.blogspot.com> dan <http://pk2pm.wordpress.com>

Email : suhanaipb@gmail.com, HP 081310858708

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

adalah peningkatan produksi ikan pada tahun 2009 sebesar 9,7 juta ton dengan nilai ekspor sebesar 5 milyar \$ US. Namun demikian, sampai akhir periode KIB jilid I target revitalisasi kelautan dan perikanan tersebut kembali tidak tercapai. Data FAO (2009) memprediksi produksi perikanan nasional tidak akan melebihi 7 juta ton dan nilai ekspor diperkirakan hanya mencapai 2,1 milyar \$ US.

Kegagalan demi kegagalan program peningkatan produksi perikanan pada tiga periode pemerintahan sebelumnya ternyata tidak membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk berfikir ekstra guna menyusun terobosan baru. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2009-2014 yang kembali mereinkarnasi kebijakan peningkatan produksi perikanan dengan berganti nama menjadi kebijakan Minapolitan. Target program Minapolitan tersebut adalah peningkatan produksi ikan sebesar 50 Juta Ton dan nilai ekspor sebesar 11 milyar \$ US. Namun demikian, program minapolitan tersebut saat ini sudah berhenti ditengah jalan, seiring dengan beralihnya Menteri Kelautan dari Fadel Muhamad ke Sharif Cicip Sutardjo.

Memasuki periode Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, arah kebijakan kelautan dan perikanan berubah dari pendekatan produksi ikan menjadi Industrialisasi Perikanan berbasis Unit Pengolahan Ikan (UPI). Namun demikian, perubahan kebijakan tersebut terlihat tidak didukung perencanaan yang matang. Hal ini terlihat dari industrialisasi perikanan yang dikembangkan ternyata basisnya di Pulau Jawa yang sudah tidak memiliki dukungan bahan baku ikan. Akibatnya KKP kembali dengan gegap gempita menyakinkan publik dan Dewan Perwakilan Rakyat akan pentingnya ikan impor untuk memasok kebutuhan bahan baku UPI nasional, dan akhirnya impor ikan kembali dilegalkan.

Namun demikian publik, termasuk penulis tidak yakin ikan yang diimpor tersebut hanya untuk kebutuhan bahan baku UPI nasional, akan tetapi banyak yang langsung masuk ke pasar-pasar tradisional. Ketidakyakinan penulis tersebut didasarkan pada hasil analisis terhadap dugaan maraknya impor ikan ilegal yang masuk ke Indonesia tahun 2010. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa dugaan impor ikan ilegal Indonesia dari China pada Tahun 2010 mencapai 51,28 persen dari total nilai impor ikan Indonesia dari China. Namun demikian walaupun terjadi peningkatan impor ikan nasional, ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kapasitas terpakai pada Industri pengolahan ikan

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

nasional. Hasil survey Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada periode 2010 kapasitas industri perikanan yang terpakai hanya mencapai dibawah 70 persen, tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya bahwa impor ikan tersebut tidak sepenuhnya diperuntukan bagi pasokan kebutuhan bahan baku UPI, akan tetapi langsung dipasarkan ke pasar-pasar dalam negeri.

Asing Kuasai Sektor Perikanan

Ketidak jelasan dan ketidak konsistennya kebijakan kelautan dan perikanan tersebut telah berdampak pada investasi sektor perikanan yang semakin dikuasai oleh asing. Kalau kita kembali melihat dorongan pemangku kepentingan sektor perikanan tahun sejak tahun 2007 untuk membatasi kepentingan asing di sektor perikanan sangat tinggi, puncaknya ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi mengesahkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) No 5 Tahun 2008 tentang izin usaha perikanan tangkap. Dan dipertegas kembali dengan disahkannya revisi UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada masa akhir periode Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan DPR-RI periode 2004-2009. Dimana pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut kepentingan asing di sektor perikanan sangat diperketat dan lebih mendorong keterlibatan nelayan, pembudidaya ikan, investor dalam negeri dan pengusaha ikan nasional.

Akibatnya, investasi asing pada sector perikanan tahun 2008 dan 2009 menurun drastis, dan minat investasi dalam negeri cenderung meningkat. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM 2011) menunjukkan bahwa investasi asing (PMA) tahun 2007 mencapai 24,7 juta US \$ dan menurun drastic pada tahun 2008 hanya mencapai 2,4 juta US \$ dan akhir tahun 2009 kembali meningkat menjadi 5,1 juta US \$. Sementara itu pasca keluarnya Permen KP No 5 Tahun 2008 minat investasi dalam negeri mulai tumbuh. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM 2011) menunjukkan bahwa investasi dalam negeri (PMDN) tahun 2007 hanya sebesar 3,1 milyar rupiah menjadi 24,7 milyar rupiah pada tahun 2009.

Namun demikian, memasuki periode Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad, (Permen-KP) No 5 Tahun 2008 tentang izin usaha perikanan tangkap diupayakan untuk direvisi kembali dengan memasukan kembali kepentingan asing. Akibatnya investasi asing kembali menguasai sektor perikanan. Data

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

BKPM (2012) menunjukkan bahwa 99,89 persen investasi perikanan tahun 2011 bersumber dari asing (PMA) dan pada triwulan 1 2012 investasi sektor perikanan 100 persen dari asing.

Ekspor Ikan Illegal

Selain itu juga, ketidakjelasan arah kebijakan sektor perikanan tersebut telah berdampak pada tingginya aktivitas kejahatan perikanan, terutama aktivitas perikanan yang tidak dilaporkan (unreported fishing). Misalnya perdagangan ikan tuna antara Indonesia dengan Thailand. Data UN-Comtrade (2011) mengindikasikan semakin maraknya ekspor ikan Tuna illegal dari Indonesia ke Thailand. Pada Tahun 2000 tercatat dugaan ekspor ikan tuna *Albacore* secara illegal mencapai 52 persen dari total volume ekspor ikan tuna *Albacore* Indonesia ke Thailand, yaitu mencapai 271.419 Kg dengan nilai mencapai 1.070.630 US \$. Sementara itu pada Tahun 2010, dugaan ekspor ikan tuna *Albacore* illegal ke Thailand semakin meningkat sampai 69,20 persen dari total volume ekspor ikan tuna *Albacore* Indonesia ke Thailand. Volume ekspor ikan tuna *Albacore* illegal dari Indonesia ke Thailand tahun 2010 diperkirakan mencapai 2.352.724 Kg dengan nilai mencapai 8.326.839 US \$.

Pasokan bahan baku illegal tersebut rupanya dimanfaatkan oleh Thailand untuk memasok kebutuhan bahan baku Industri Pengolahan Ikan yang ada di negara tersebut. Thailand selama ini terkenal didunia sebagai pemasok utama produk ikan olahan, padahal sekitar 90 persen pasokan bahan bakunya berasal dari Indonesia dan Philipina. Hal ini terbukti pada Tahun 2010 UN-Comtrade memposisikan Thailand sebagai negara kedua terbesar dunia sebagai pemasok produk ikan olahan setelah China, sementara Indonesia hanya puas di posisi ke 10 terbesar dunia. Total kontribusi Thailand terhadap total ekspor produk ikan olahan mencapai 20,2 persen, sementara Indonesia hanya berkontribusi sebesar 2,7 persen dari total ekspor produk ikan olahan dunia.

Berdasarkan hal tersebut sungguh sangat ironis, sumberdaya ikan Indonesia yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti tuna ternyata tidak dinikmati oleh para nelayan dan Industri Pengolahan Ikan dalam negeri. Di sisi lain, Unit Pengolahan Ikan Nasional setiap tahunnya berlomba-lomba terus meningkatkan impor bahan baku ikan pindang dan ikan asin. Kebijakan pengembangan industri pengolahan ikan pindang dan asin secara besar-besaran oleh KKP menunjukkan bahwa secara sistematis masyarakat Indonesia akan disugahi oleh konsumsi ikan

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

pindang dan ikan asin, dimana nilai kandungan gizi nya sangat rendah bahkan cenderung tidak ada. Sementara itu ikan segar yang memiliki kandungan gizi baik, lebih banyak di ekspor baik legal maupun illegal ke pasar internasional. Sehingga sangat wajar apabila kualitas sumberdaya manusia Indonesia sulit untuk dapat berkembang secara baik karena hanya disediakan konsumsi ikan pindang dan ikan asin.

Rekonstruksi Kebijakan Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah dan para pemangku kebijakan kelautan dan perikanan hendaknya dapat duduk bersama dalam merekonstruksi kebijakan kelautan dan perikanan di masa yang akan datang. Keberpihakan kepada kelestarian sumberdaya ikan dan kepentingan nasional harus menjadi komitmen bersama. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merekonstruksi kebijakan kelautan dan perikanan nasional, yaitu pertama, perlu ada grand design industrialisasi perikanan yang berpihak pada pengembangan sumberdaya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Indonesia akan lebih maju kalau didukung oleh sumberdaya manusia yang baik dan SDM yang baik bisa dibentuk dengan adanya asupan gizi yang lebih baik. Oleh sebab itu industrialisasi perikanan nasional harus dapat mendukung pengembangan SDM nasional yang lebih baik. Namun demikian, kalau industrialisasi perikanan yang digalakan pemerintah saat ini penulis khawatir SDM nasional kedepan akan semakin terpuruk. Industrialisasi perikanan yang ada saat ini lebih mementingkan pengembangan SDM negara lain, dibandingkan SDM negaranya sendiri. Hal ini terbukti dengan target industrialisasi perikanan untuk mengeksport ikan-ikan kualitas baik dari Indonesia, seperti tuna, cakang, udang, ikan-ikan karang dan ikan-ikan kualitas baik lainnya. Sementara itu kebutuhan konsumsi ikan dalam negeri cukup disediakan ikan asin dengan bahan baku impor dari negara lain. Pertanyaannya sekarang, ahli gizi mana yang dapat menjelaskan bahwa ikan asin dapat meningkatkan kualitas SDM nasional. Pemerintah harusnya tetap konsisten dalam menjalankan undang-undang perikanan nasional. Dalam Pasal 25B Ayat (2) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ditegaskan bahwa pengeluaran hasil produksi usaha perikanan ke luar negeri (ekspor) dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional. Pasal 25B ini jelas sangat berpihak pada kepentingan

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

nasional, namun demikian dalam implementasi dilapangan belum diikuti dengan kebijakan yang nyata. Hal ini terbukti dengan kebijakan Industrialisasi perikanan yang lebih mementingkan kebutuhan ikan negara lain. Industrialisasi perikanan jangan hanya dipandang bagaimana meningkatkan nilai ekspor produk perikanan saja, akan tetapi perlu memiliki agenda pembangunan SDM nasional yang lebih baik. Oleh sebab itu implementasi Pasal 25B Ayat (2) tersebut saat ini diperlukan guna meningkatkan kualitas SDM Nasional.

Kedua, industrialisasi perikanan yang dikembangkan harus berbasiskan bahan baku dalam negeri, jangan impor, sehingga pengembangan Industri pengolahan ikan jangan dipusatkan di pulau Jawa, akan tetapi harus dikembangkan di pusat-pusat bahan baku seperti di kawasan Indonesia Bagian Timur. Oleh sebab itu dukungan infrastruktur seperti listrik, bahan bakar minyak, air bersih dan transportasi antar pulau di kawasan Indonesia Bagian Timur perlu segera dibenahi. Sementara itu, untuk menjaga ketersediaan bahan baku sepanjang tahun, pemerintah perlu secepatnya membentuk Bulog Perikanan. Hal ini diperlukan mengingat produksi ikan para nelayan sangat tergantung kondisi cuaca, sehingga keberadaan Bulog Perikanan diperlukan guna mengatur manajemen ketersediaan bahan baku ikan untuk UPI dan kebutuhan konsumsi langsung masyarakat.

Ketiga, pengembangan industrialisasi perikanan hendaknya tidak hanya difokuskan untuk komoditas ikan, akan tetapi perlu dikembangkan untuk industri pengolahan rumput laut. Hal ini disebabkan dalam sepuluh tahun terakhir produksi rumput laut terus menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, bahkan saat ini kontribusinya sudah diatas 60 persen dari total produksi perikanan budidaya.

Keempat, untuk mencegah semakin tingginya kasus ekspor ikan illegal dari Indonesia ke negara lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu meningkatkan pengawasan di perairan Indonesia. Karena dugaan kuat ekspor ikan illegal tersebut dilakukan di tengah laut oleh para oknum nelayan dan pengusaha perikanan nasional. Alhasil tanpa adanya perubahan perencanaan pembangunan perikanan yang baik, manajemen perikanan nasional akan semakin amburadul. Oleh sebab itu KKP perlu segera mereformulasi kebijakan perikanan nasional.

Sumber : Tabloid Inspirasi, Agustus 2012

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

22.02.2012 09:26

Manajemen Perikanan Amburadul

Penulis : Suhana*

Kisruh impor ikan dalam dua tahun terakhir belum menemukan titik terang dalam penyelesaiannya. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan perikanan nasional semakin amburadul. Amburadulnya manajemen perikanan nasional terlihat dari tidak konsistennya arah kebijakan perikanan nasional.

Arah kebijakan perikanan nasional dalam periode Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini terlihat tidak fokus. Pada periode Fadel Muhammad sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, arah kebijakan perikanan lebih menekankan pada peningkatan produksi ikan nasional sampai 353 persen, sehingga pada periode tersebut impor ikan secara tegas diminta untuk dihentikan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan gegap gempita meyakinkan publik bahwa kebutuhan ikan nasional dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, jadi tidak perlu impor ikan.

Dukungan publik terhadap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut sangat tinggi. Namun demikian, publik masih belum yakin 100 persen terhadap penghentian impor ikan tersebut karena di lapangan banyak ditemukan ikan-ikan impor yang sudah merembes ke pasar-pasar tradisional.

Memasuki periode Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, arah kebijakan kelautan dan perikanan berubah dari pendekatan produksi ikan menjadi industrialisasi perikanan berbasis unit pengolahan ikan (UPI). Namun demikian, perubahan kebijakan tersebut terlihat tidak didukung perencanaan yang matang.

Hal ini terlihat dari industrialisasi perikanan yang dikembangkan ternyata berbasis di Pulau Jawa yang sudah tidak memiliki dukungan bahan baku ikan. Akibatnya, KKP kembali dengan gegap gempita menyakinkan publik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan pentingnya ikan impor untuk memasok kebutuhan bahan baku UPI nasional, dan akhirnya impor ikan kembali dilegalkan. Namun demikian, publik—termasuk penulis—tidak yakin ikan yang diimpor tersebut hanya untuk kebutuhan bahan baku UPI nasional, namun banyak yang

PERPUSTAKAAN PRIBADI

Alamat Elektronik : <http://suhana-ocean.blogspot.com> dan <http://pk2pm.wordpress.com>

Email : suhanaipb@gmail.com, HP 081310858708

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

langsung masuk ke pasar-pasar tradisional. Ketidakyakinan penulis tersebut didasarkan pada hasil analisis terhadap dugaan maraknya impor ikan ilegal yang masuk ke Indonesia tahun 2010.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa dugaan impor ikan ilegal Indonesia dari China pada 2010 mencapai 51,28 persen dari total nilai impor ikan Indonesia dari China. Namun demikian, walaupun impor ikan nasional meningkat, ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kapasitas terpakai pada industri pengolahan ikan nasional.

Hasil survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada periode 2010, kapasitas industri perikanan yang terpakai hanya mencapai di bawah 70 persen, tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya, impor ikan tersebut tidak sepenuhnya diperuntukkan bagi pasokan kebutuhan bahan baku UPI, namun langsung dipasarkan ke pasar-pasar dalam negeri.

Ekspor Ikan Ilegal

Di tengah tingginya laju impor ikan nasional, penulis menemukan data yang menunjukkan aktivitas ekspor ikan ilegal dari Indonesia ke negara lain, khususnya Thailand, semakin tinggi. Data UN-Comtrade (2011) mengindikasikan semakin maraknya ekspor ikan tuna ilegal dari Indonesia ke Thailand.

Pada 2000, tercatat dugaan ekspor ikan tuna albacore secara ilegal mencapai 52 persen dari total volume ekspor ikan tuna albacore Indonesia ke Thailand, yaitu 271.419 kg dengan nilai mencapai US\$ 1.070.630.

Sementara itu, pada 2010, dugaan ekspor ikan tuna albacore ilegal ke Thailand semakin meningkat sampai 69,20 persen dari total volume ekspor ikan tuna albacore Indonesia ke Thailand. Volume ekspor ikan tuna albacore ilegal dari Indonesia ke Thailand tahun 2010 diperkirakan mencapai 2.352.724 kg dengan nilai mencapai US\$ 8.326.839.

Pasokan bahan baku ilegal tersebut rupanya dimanfaatkan Thailand untuk memasok kebutuhan bahan baku industri pengolahan ikan yang ada di negara tersebut. Thailand selama ini terkenal di dunia sebagai pemasok utama produk ikan olahan, padahal sekitar 90 persen pasokan bahan bakunya berasal dari Indonesia dan Filipina.

Hal ini terbukti pada tahun 2010 UN-Comtrade memosisikan Thailand sebagai negara kedua terbesar dunia sebagai pemasok produk ikan olahan setelah China, sementara Indonesia hanya puas di posisi 10 terbesar dunia.

PERPUSTAKAAN PRIBADI

Alamat Elektronik : <http://suhana-ocean.blogspot.com> dan <http://pk2pm.wordpress.com>

Email : suhanaipb@gmail.com, HP 081310858708

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Total kontribusi Thailand terhadap total ekspor produk ikan olahan mencapai 20,2 persen, sementara Indonesia hanya berkontribusi 2,7 persen dari total ekspor produk ikan olahan dunia.

Tidak Dinikmati

Berdasarkan hal tersebut, sungguh ironis sumber daya ikan Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti tuna ternyata tidak dinikmati oleh para nelayan dan industri pengolahan ikan dalam negeri. Di sisi lain, Unit Pengolahan Ikan Nasional setiap tahunnya berlomba-lomba terus meningkatkan impor bahan baku ikan pindang dan ikan asin.

Kebijakan pengembangan industri pengolahan ikan pindang dan asin secara besar-besaran oleh KKP menunjukkan bahwa secara sistematis masyarakat Indonesia akan disugahi oleh konsumsi ikan pindang dan ikan asin, di mana nilai kandungan gizinya sangat rendah, bahkan cenderung tidak ada.

Sementara itu, ikan segar yang memiliki kandungan gizi baik lebih banyak di ekspor, baik legal maupun ilegal ke pasar internasional. Dengan demikian, sangat wajar apabila kualitas sumber daya manusia Indonesia sulit berkembang dengan baik karena hanya disediakan konsumsi ikan pindang dan ikan asin.

Berdasarkan kondisi tersebut, KKP hendaknya segera mengevaluasi kembali kebijakan industrialisasi perikanan berbasis bahan baku impor. Industrialisasi perikanan yang dikembangkan harus berbasis bahan baku dalam negeri, sehingga pengembangan industri pengolahan ikan jangan dipusatkan di Pulau Jawa, tapi harus dikembangkan di pusat-pusat bahan baku seperti di kawasan Indonesia bagian timur.

Oleh sebab itu, dukungan infrastruktur seperti listrik, bahan bakar minyak, air bersih, dan transportasi antarpulau di kawasan Indonesia bagian timur perlu segera dibenahi.

Sementara itu, untuk menjaga ketersediaan bahan baku sepanjang tahun, pemerintah perlu secepatnya membentuk Bulog Perikanan. Hal ini diperlukan mengingat produksi ikan para nelayan sangat tergantung kondisi cuaca, sehingga keberadaan Bulog Perikanan diperlukan guna mengatur manajemen ketersediaan bahan baku ikan untuk UPI dan kebutuhan konsumsi langsung masyarakat.

PERPUSTAKAAN PRIBADI

Alamat Elektronik : <http://suhana-ocean.blogspot.com> dan <http://pk2pm.wordpress.com>

Email : suhanaipb@gmail.com, HP 081310858708

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

Selain itu, pengembangan industrialisasi perikanan hendaknya tidak hanya difokuskan untuk komoditas ikan, tetapi perlu dikembangkan untuk industri pengolahan rumput laut.

Hal ini karena dalam 10 tahun terakhir produksi rumput laut terus menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, bahkan saat ini kontribusinya sudah di atas 60 persen dari total produksi perikanan budi daya.

Sementara itu, demi mencegah semakin tingginya kasus ekspor ikan ilegal dari Indonesia ke negara lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu meningkatkan pengawasan di perairan Indonesia. Ini karena dugaan kuat ekspor ikan ilegal tersebut dilakukan di tengah laut oleh para oknum nelayan dan pengusaha perikanan nasional.

Alhasil tanpa adanya perubahan perencanaan pembangunan perikanan yang baik, manajemen perikanan nasional akan semakin amburadul. Oleh sebab itu, KKP perlu segera mereformulasi kebijakan perikanan nasional.

*Penulis adalah Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.

Sumber : <http://www.sinarharapan.co.id/content/read/manajemen-perikanan-amburadul/>

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

14.02.2012 09:29

Pulau-pulau Kecil Terancam

Penulis : Suhana*

Di tengah hiruk-pikuk perpolitikan nasional, nasib pulau kecil yang ada di Indonesia semakin terancam. Namun, perhatian para politikus nasional, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya belum melihat hal tersebut menjadi sebuah ancaman serius bagi keutuhan bangsa dan negara.

Padahal saat ini keberadaan pulau-pulau kecil tersebut sudah sangat mendesak untuk diperhatikan, dibandingkan dengan gejolak politik yang tidak jelas arahnya mau ke mana.

Nasib pulau kecil saat ini perlu penanganan yang cepat, tepat, dan tegas. Hal ini disebabkan keberadaan pulau kecil tersebut sangat menentukan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk keutuhan ekonomi nasional.

Publikasi terbaru dari Badan Informasi Geospasial, atau dulu terkenal dengan nama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsurtanal), menunjukkan jumlah pulau yang ada di Indonesia saat ini ternyata tinggal 13.466 pulau, bukan 17.508 pulau seperti yang diyakini pemerintah selama ini.

Menurunnya jumlah pulau tersebut disebabkan pulau gosong tidak lagi dimasukkan sebagai pulau, karena tidak sesuai dengan definisi pulau yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu objek yang masih tampak saat air laut pasang. Sementara pulau gosong hanya muncul ketika air laut surut dan akan tenggelam pada saat air laut pasang (*Kompas*, 8/2/2012).

Selain itu, menurunnya jumlah pulau tersebut disebabkan kerusakan sumber daya pesisir, seperti *mangrove* dan terumbu karang, serta banyaknya aktivitas penambangan pasir di sekitar pulau kecil tersebut.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011) menunjukkan 28 pulau kecil di Indonesia sudah tenggelam dan ada sekitar 24 pulau kecil yang terancam tenggelam.

Beberapa pulau yang sudah tenggelam dan terancam tenggelam tersebut dua di antaranya pulau kecil terluar yang dijadikan titik dasar (TD) kepulauan Indonesia, yaitu Pulau Nipa (TD 190 dan 190A) dan Pulau Maratua (TD 039). Penyebab

PERPUSTAKAAN PRIBADI

Alamat Elektronik : <http://suhana-ocean.blogspot.com> dan <http://pk2pm.wordpress.com>

Email : suhanaipb@gmail.com, HP 081310858708

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

utama tenggelamnya pulau kecil di Indonesia adalah penambangan pasir dan abrasi pantai.

Catatan *Kompas* (9/2/2012) menunjukkan abrasi pantai yang terjadi di Pulau Maratua disebabkan gelombang tinggi dan banyaknya masyarakat yang membangun rumah di tepi pantai.

Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kegiatan (1) konservasi, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) penelitian dan pengembangan, (4) budi daya laut, (5) pariwisata, (6) usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari, (7) pertanian organik, dan (8) peternakan.

Namun yang terjadi saat ini prioritas pemanfaatan pulau-pulau kecil tersebut sudah tidak sejalan lagi dengan amanat undang-undang tersebut.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011) menunjukkan aktivitas pertambangan yang tidak direkomendasikan untuk dilakukan di pulau kecil sampai saat ini masih terjadi, seperti yang terjadi di Pulau Lemo, Pulau Buaya, dan Pulau Laburoko Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang dijadikan tempat penambangan nikel.

Selain itu, perkebunan sawit saat ini banyak merambah pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia, seperti yang terjadi di Pulau Bawal Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

Tindakan Afirmatif

Berdasarkan kondisi di atas, permasalahan yang mendesak ditangani saat ini adalah pertama, masalah investasi pembangunan di pulau kecil. Investasi yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang 27/2007 hendaknya ditinjau kembali, seperti investasi pertambangan dan perkebunan sawit.

Hal ini disebabkan keberadaan kedua aktivitas ekonomi tersebut apabila dipaksakan dilakukan di pulau kecil akan sangat mengancam keberadaannya, termasuk keberadaan masyarakat yang ada di pulau-pulau kecil.

Kasus tenggelamnya pulau kecil yang terjadi selama ini hendaknya dijadikan pelajaran utama, di mana penyebab utamanya adalah aktivitas pertambangan di pulau kecil. Hal yang sama apabila perkebunan kelapa sawit dipaksakan di pulau

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

kecil tidak menutup kemungkinan akan mengancam ekosistem yang ada di pulau kecil tersebut.

Kedua, kerusakan ekosistem di pulau kecil. Kerusakan ekosistem pulau kecil tersebut selain disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga disebabkan laju pertumbuhan penduduk pulau kecil yang terus meningkat. Akibatnya, kebutuhan akan lahan untuk permukiman akan terus meningkat.

Dengan melihat keterancaman pulau kecil dari investasi dan kerusakan lingkungan tersebut, saat ini diperlukan tindakan afirmatif, yaitu tindakan khusus untuk mencapai kondisi pengelolaan pulau kecil yang ramah lingkungan, keadilan bagi pengembangan ekonomi masyarakat lokal, dan demi menjaga keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.

Tindakan afirmatif tersebut diperlukan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Di tingkat pusat, panduan investasi di pulau-pulau kecil hendaknya dapat ditingkatkan menjadi sebuah keputusan presiden atau peraturan pemerintah agar dapat dijadikan panduan oleh semua instansi yang berwenang menarik investasi ke wilayah Indonesia, termasuk ke pulau kecil.

Saat ini panduan investasi tersebut baru sebatas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga sangat sulit untuk dijadikan acuan bagi semua instansi, mengingat ego sektoral sampai saat ini masih sangat tinggi. Pandangan penulis, mengubah aturan jauh lebih mudah daripada menghilangkan ego sektoral yang ada di setiap instansi.

Selain itu juga program-program pembangunan di pulau-pulau kecil hendaknya dapat menjadi perhatian oleh semua kementerian yang ada di pemerintah. Program tanam pohon di pulau kecil, adopsi pulau kecil oleh pihak perguruan tinggi, dan pengembangan infrastruktur transportasi antarpulau hendaknya didukung anggaran yang memadai.

Oleh sebab itu dukungan politik anggaran dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kepentingan penyelamatan dan pengelolaan pulau kecil saat ini sangat mendesak.

Di tingkat pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), izin investasi harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah jangan dijadikan momentum

DOKUMENTASI PEMIKIRAN SUHANA
KLIPING TULISAN DAN WAWANCARA SUHANA DI MEDIA MASSA
TAHUN 2012

untuk menarik investasi daerah tanpa adanya pertimbangan kerusakan lingkungan di wilayah pulau-pulau kecil.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri hendaknya dapat terus berperan aktif dalam mengawasi peraturan daerah, khususnya yang terkait investasi di pulau-pulau kecil.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah Daerah, terutama Pasal 37 Ayat (4) yang menyatakan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri Dalam Negeri.

Keterpaduan dukungan pemerintah pusat, DPR, dan Pemerintah Daerah saat ini mendesak untuk dilakukan. Tanpa adanya tindakan afirmatif yang cepat, tepat, dan tegas dari pemerintah pusat, DPR, dan Pemerintah Daerah tersebut dikhawatirkan keberadaan pulau kecil, masyarakat pulau kecil, dan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia akan terus terancam.

**Penulis adalah Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.*

Sumber : <http://www.sinarharapan.co.id/content/read/pulau-pulau-kecil-terancam/>